

BAB IV

MASYARAKAT POSO DALAM LINTAS SEJARAH

Setelah mengelaborasi landasan konseptual dan kerangka teori yang dipandang perlu untuk menjadi batasan-batasan deskriptif dan pisau analisis, maka mulai bab IV ini akan disajikan fakta-fakta historis yang menjadi pokok kajian dalam disertasi ini. Fakta historis pertama yang akan disajikan dalam bab IV ini adalah realitas Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) yang memiliki jemaat-jemaat lokal di dua provinsi, yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Di Provinsi Sulawesi Tengah, jemaat-jemaat GKST tersebar di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Poso, Morowali, Touna, Parimo, Donggala, Sigi, dan Kota Madya Palu. Jemaat-jemaat di Provinsi Sulawesi Selatan tersebar di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara. Namun demikian, pusat gereja yang disebut Sinode dan sebagian besar jemaat-jemaat tersebut berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Poso. Penelitian ini dilakukan di Jemaat Eli Salom Kele'i yang terletak di Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso. Oleh sebab itu konteks sosial yang relevan untuk diuraikan di sini adalah wilayah Kabupaten Poso.

1. Letak Geografis

Kabupaten Poso adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tengah.¹ Secara geografis, kabupaten Poso terletak di tengah pulau Sulawesi dengan koordinat 1 derajat 06'44" - 2 derajat 12'53" lintang selatan

¹ Selain kabupaten Poso, terdapat juga Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Luwuk, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Touna, dan Kotamadya Palu.

dan 120 derajat 05'09" - 122 derajat 52'04" bujur timur. Kabupaten Poso memiliki luas 8.712,25 km² atau 12,81 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Secara administratif di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Parimo, di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Luwu Utara, di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sigi, dan di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Morowali.²

Dilihat dari segi ketinggiannya di atas permukaan laut, wilayah terendah berada pada posisi 0-7 meter dan wilayah tertinggi berada pada posisi 500 meter. Oleh sebab itu iklim di wilayah ini masuk dalam kategori iklim hujan tropis yang dipengaruhi oleh dua musim tetap. Sepanjang bulan April sampai dengan September bertiup angin timur yang basah dan sepanjang bulan Oktober hingga Maret bertiup angin barat yang kering.³ Keadaan ini membuat tanah di kabupaten Poso sangat cocok untuk persawahan, palawija, tanaman tahunan, dan tanaman industri seperti karet, kelapa sawit, kakao, dll.

2. Keadaan Penduduk

Menurut data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso, sampai tahun 2012 penduduk di wilayah ini berjumlah 226.389 jiwa yang tersebar di sembilan belas kecamatan. Sampai dengan tahun 2012 jumlah penduduk terbesar terdapat di kecamatan Poso Kota, sebanyak 21.910 jiwa atau 9,67%. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di kecamatan Lore Barat, sebanyak 3.053 jiwa, atau 1,34%.

²<http://posokab.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=1>; Internet; dikunjungi tanggal 24 April 2014.

³ Haliadi Sadi, et.al., *Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah di Poso* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007), 27.

Tabel 1: Jumlah Penduduk
Kabupaten Poso Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pamona Selatan	18.205	18.276	18.372	18.712	19.880
2	Pamona Barat	8.722	9.132	9.344	9.516	10.110
3	Pamona Tenggara	6.636	6.534	6.487	6.607	7.019
4	Pamona Puselemba	-	-	17.973	18.306	19.447
5	Pamona Utara	31.480	30.599	12.218	12.444	13.222
6	Pamona Timur	9.477	9.496	9.531	9.707	10.312
7	Lore Selatan	5.272	5.488	5.631	5.735	6.093
8	Lore Barat	2.642	2.750	2.821	2.874	3.053
9	Lore Utara	8.593	10.312	11.902	12.121	12.878
10	Lore Tengah	4.296	4.146	4.033	4.108	4.364
11	Lore Timur	3.915	4.483	4.877	4.966	5.276
12	Lore Peore	2.723	2.835	2.944	2.988	3.184
13	Poso Pesisir	18.171	19.098	20.098	20.470	21.746
14	Poso Pesisir Selatan	8.546	8.725	8.842	9.006	9.566
15	Poso Pesisir Utara	13.240	14.763	15.681	15.971	16.967
16	Poso Kota	17.388	18.866	20.250	20.263	21.910
17	Poso Kota Selatan	7.496	8.328	11.058	9.158	9.729
18	Poso Kota Utara	9.877	10.578	8.992	11.263	11.967
19	Lage	17.410	17.863	18.174	18.511	19.666
	JUMLAH	194.139	202.272	209.228	213.906	226.389

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso

Dari semua kecamatan ini, ada tiga kecamatan yang terletak di kota Poso dengan jumlah penduduk 43.606 jiwa atau 19,3%. Itu berarti sebagian besar penduduk kabupaten Poso tinggal di daerah pedesaan, yaitu 182.783 jiwa atau 80,7%. Dari sebagian besar penduduk pedesaan ini, 79.990 jiwa atau 43,8% tinggal di wilayah sosio-kultural Pamona. Yang sisanya tersebar di wilayah sosio kultural Poso Pesisir sebanyak 48.279 jiwa atau 26,4%, Lore sebanyak 34.848 jiwa atau 19,1%, dan Lage sebanyak 19.666 atau 10,6%.

Tabel 2: Jumlah Penduduk
Menurut Wilayah Kota dan Desa

No	Wilayah Kota dan Desa	Jumlah	Prosentasi
1	Perkotaan	43.606	19,3
2	Pedesaan	182.783	80,7
	JUMLAH	226.389	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso.

Tabel 3. Jumlah Penduduk
Menurut Wilayah Sosio Kultural

No	Wilayah Sosio Kultural	Jumlah	Prosentasi
1	Poso Kota	43.606	19,3
2	Poso Pesisir	48.279	21,3
3	Pamona	79.990	35,4
4	Lore	34.848	15,3
5	Lage	19.666	8,7
	JUMLAH	226.389	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso.

Wilayah Poso kota didiami oleh penduduk dengan latar belakang suku yang sangat beragam, antara lain suku Pamona, Mori, Bungku, Tojo, Lore, Kaili, Gorontalo, Bugis, Makasar, Toraja, Manado, Sangir, Jawa, Arab, Tionghoa, dll. Sementara wilayah Pamona didiami oleh mayoritas suku Pamona, wilayah Poso Pesisir didiami oleh suku Pamona, Bali, Bugis, Makasar, dan Kaili. Wilayah Lore didiami oleh mayoritas suku Lore, dan wilayah lage didiami oleh mayoritas suku Pamona. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara sosio kultural Kabupaten Poso cukup majemuk, khususnya di daerah pesisir pantai. Sementara di daerah pedalaman atau pedesaan cukup dipengaruhi oleh suku Pamona dan Lore.

Ditinjau dari agama yang dianut maka sebagian besar penduduk di kabupaten Poso memeluk agama Kristen, yaitu 124.899 jiwa atau 55.17%. Penduduk yang beragama Kristen ini pada umumnya tinggal di wilayah sosio kultural Pamona dan Lore. Pemeluk agama Islam adalah kelompok terbesar kedua dengan jumlah 88.880 jiwa atau 39.26%. Penduduk yang beragama Islam pada umumnya tinggal di kota Poso dan Poso Pesisir. Kalau dihubungkan dengan peta kultural kabupaten Poso maka dapat dikatakan bahwa penduduk lokal yang tinggal di pedalaman pada umumnya memeluk agama Kristen, sedangkan kaum pendatang yang kebanyakan tinggal di daerah pesisir memeluk agama Islam.

Tabel 4. Prosentasi Pemeluk Agama Menurut Kecamatan Tahun 2012

No	Kecamatan	Prosentasi (%)					
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Lainnya
1	Pamona Selatan	42.55	55.00	0.78	1.67	0.00	0.00
2	Pamona Barat	0.84	55.41	2.00	41.75	0.00	0.00
3	Pamona Tenggara	0.50	94.70	0.00	1.97	2.83	0.00
4	Pamona Utara	1.14	97.11	0.27	1.42	0.06	0.00
5	Puselemba	-	-	-	-	-	-
6	Pamona Timur	3.54	95.94	0.26	0.27	0.00	0.00
7	Lore Selatan	2.89	96.73	0.38	0.00	0.00	0.00
8	Lore Barat	2.48	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Lore Utara	47.35	51.99	0.60	0.06	0.00	0.00
10	Lore Tengah	4.78	92.77	2.46	0.00	0.00	0.00
11	Lore Timur	34.25	46.66	3.04	16.05	0.00	0.00

No	Kecamatan	Prosentasi (%)					
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Lainnya
12	Lore Peore	10.95	79.39	0.00	9.66	0.00	0.00
13	Poso Pesisir	78.77	20.90	0.13	0.20	0.00	0.00
14	Ps Pesisir Selatan	13.86	66.25	0.34	19.55	0.00	0.00
15	Ps Pesisir Utara	54.21	19.16	0.81	25.82	0.00	0.00
16	Poso Kota	98.48	1.12	0.00	0.38	0.02	0.00
17	Ps Kota Selatan	17.27	80.90	1.39	0.44	0.00	0.00
18	Ps Kota Utara	83.71	14.27	1.48	0.53	0.00	0.00
19	Lage	26.77	72.85	0.24	0.15	0.00	0.00
	Rata-rata	39.26	55.17	0.57	4.87	0.13	0.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso.

3. Latar Belakang Keadaan Sosial Budaya

Sebelum Kabupaten Poso dimekarkan menjadi beberapa kabupaten yang lain, seperti Kabupaten Morowali dan Kabupaten Touna, secara kultural penduduk asli di Kabupaten Poso berasal dari beberapa kelompok suku yang hidup di wilayah adatnya masing-masing, yaitu kelompok suku Bungku, Mori, Pamona, Tojo, Pekurehua, Bada, Besoa, dan suku-suku terpencil yang disebut suku Ta'a. Suku-suku Bungku mendiami daerah sebelah tenggara Provinsi Sulawesi Tengah sampai di perbatasan Sulawesi Tenggara. Suku-suku Mori mendiami daerah dataran rendah di antara teluk Tolo dan teluk Bone. Suku-suku Pamona mendiami daerah pedalaman bagian tengah pulau Sulawesi, terutama di sekitar danau Poso sampai ke pesisir teluk Tomini di sebelah utara, tempat bermuaranya sungai Poso. Suku-suku Tojo mendiami pesisir pantai timur teluk Tomini dan dataran rendah di sekitarnya. Suku-suku Pekurehua, Bada, dan Besoa mendiami

daerah sebelah barat tanah Poso, dataran-dataran tinggi di daerah pegunungan Henema. Sementara suku-suku Ta'a mendiami celah-celah di kawasan bergunung-gunung di antara teluk Tomini dan teluk Tolo, khususnya di sepanjang aliran sungai Bongka.⁴ Keberadaan suku-suku ini mencerminkan keragaman dan kekayaan budaya, adat istiadat, dan bahasa di Sulawesi Tengah.

Ada beberapa teori yang menjelaskan asal usul kelompok-kelompok suku ini. Teori yang pertama bertitik tolak dari pandangan bahwa penduduk pertama di nusantara memiliki perawakan kecil dan berkulit sawo matang. Mereka adalah penduduk asli di seluruh Asia Tenggara. Sulawesi tengah mendapat bagian dalam penyebaran penduduk keturunan Weda Negrito tersebut. Pendapat ini didukung oleh bukti-bukti perawakan suku-suku terpencar di Sulawesi tengah yang dianggap sebagai penduduk asli pertama di Sulawesi tengah. Tim Peneliti Sejarah Sulawesi Tengah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menemukan ciri-ciri fisik mereka yang mirip dengan ras Weda Negrito. Sekitar tahun 3000 sebelum zaman bersama penduduk Proto Melayu masuk ke Nusantara. Kedatangan mereka mengakibatkan terjadinya percampuran turunan dengan pendatang asli sebelumnya sehingga munculah suku-suku baru yang kelak tersebar di Sulawesi tengah. Sekitar tahun 300 sebelum zaman bersama penduduk Deutro Melayu masuk wilayah Sulawesi dan mendesak penduduk sebelumnya ke daerah pedalaman.⁵ Berdasarkan teori ini dapat dikatakan bahwa penduduk pesisir pantai dan dataran-dataran rendah di Sulawesi tengah adalah keturunan ras Deutro Melayu, sementara penduduk

⁴ Tony Tampake, *Bias Budaya Sintuwu Maroso*. Makalah dalam perkuliahan Agama dan Perubahan Sosial Program Studi Magister Sosiologi Agama UKSW, 2006.

⁵ Departemen Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah, *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah* (Palu: Dep. P&K Kanwil Prop. SulTeng, 1996), 7.

yang mendiami daerah pedalaman dan dataran-dataran tinggi adalah keturunan ras campuran Weda Negrito dengan Proto Melayu. Kalau teori ini benar maka suku-suku Bungku, Mori, Tojo, dan Pamona adalah keturunan ras Deutro Melayu, sedangkan suku-suku Pekurehua, Besoa, Bada, dan Ta'a adalah keturunan campuran Weda Negrito dengan Proto Melayu.

Teori lain mengatakan bahwa berdasarkan ciri-ciri fisik, kebudayaan, dan dialek bahasa yang ditemukan pada penduduk asli di Sulawesi tengah, maka suku-suku itu masuk dalam rumpun suku-suku Toraja. Mereka mendiami daerah pedalaman dan dataran-dataran tinggi yang ada di Sulawesi tengah dan sebagian Sulawesi selatan. Pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda suku-suku ini dilokalisir menurut wilayah adatnya masing-masing sehingga menjadi empat kelompok, yaitu Palu Toraja, Koro Toraja, Poso Toraja, dan Sa'dang Toraja. Tiga kelompok suku yang disebut pertama mendiami wilayah Sulawesi tengah, sedangkan Sa'dang Toraja mendiami daerah Sulawesi selatan. Suku-suku Toraja ini berasal dari daerah tenggara pulau Sulawesi di sekitar teluk Bone. Mereka bermigrasi ke utara dan barat laut lalu mendiami dataran rendah di sekitar danau Poso dan dataran tinggi di sebelah baratnya. Dari sini mereka menyebar lagi ke arah barat, barat daya dan utara sampai ke pegunungan Toli-Toli dan pesisir Barat teluk Tomini. Kelompok suku-suku ini kemudian disebut Koro Toraja. Sementara yang lain tetap bertahan di sekitar danau Poso sampai ke pesisir timur teluk Tomini dan sebagian lagi bertahan di sekitar danau Lindu. Kelompok-kelompok ini kemudian menjadi Poso Toradja dan Palu Toradja.⁶ Kalau teori ini diterima maka dataran rendah di sekitar danau Poso menjadi tempat pemukiman dan pengembangan kebudayaan suku-suku Toraja yang pertama,

⁶ibid., 13.

sebelum mereka menyebar di seluruh wilayah Sulawesi tengah. Pada tahun 1976 di desa Peura, pesisir timur danau Poso ditemukan kapak-kapak yang terbuat dari perunggu.⁷ Tidak jauh dari situ, terdapat sebuah gua yang dijadikan tempat untuk menyimpan tulang-tulang nenek moyang yang telah meninggal. Penemuan artefak-artefak ini membuktikan bahwa suku-suku Toradja yang masuk ke Sulawesi tengah dari teluk Bone sudah mulai mengembangkan kebudayaan perunggu. Sementara itu di dataran-dataran tinggi di sebelah Barat danau Poso, terdapat situs-situs megalitik yang tersebar dalam bentuk patung-patung batu, lesung-lesung batu, dan tempat menampung air dari batu yang diduga sebagai tempat mandi. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum suku-suku Toraja masuk di Sulawesi tengah dan mengembangkan kebudayaannya, telah ada kebudayaan yang lebih tua yang berkembang di daerah pedalaman dan dataran tinggi Sulawesi tengah, yaitu kebudayaan megalitik yang halus. Menurut hasil penelitian Haliadi dan kawan-kawan, kebudayaan megalitik ini dibawa oleh orang-orang pemecah batu yang diduga berasal dari kepulauan Jepang. Mereka masuk ke Sulawesi tengah melalui daerah Minahasa di Sulawesi utara dan menyeberang pegunungan ke Gorontalo. Setelah menyusuri teluk Tomini mereka tiba di Sulawesi tengah dan mendiami dataran yang luas di sebelah barat danau Poso. Tidak lama setelah mereka tiba, datanglah orang-orang pembuat tembikar yang masuk ke Sulawesi tengah dari arah selatan. Setelah mereka mendarat di teluk Bone, mereka melewati Malili dan Wotu kemudian naik ke daerah pegunungan Takolekaju dan menuruni lembah kemudian masuk di dataran yang luas di sebelah selatan danau Poso. Kedatangan migrasi kedua ini mendesak kelompok migrasi pertama untuk bergerak naik ke daerah dataran-

⁷Ibid., 8.

dataran tinggi di sebelah barat. Dalam perkembangan kemudian, kelompok migrasi pertama dengan kebudayaan megalitiknya mendiami dataran tinggi di pegunungan Fennema dan melahirkan suku-suku Pekurehua, Besoa, Bada, dan Rampi. Sedangkan kelompok migrasi kedua dengan kebudayaan tembikar mendiami dataran rendah di sekitar danau Poso sampai ke timur. Kelompok ini melahirkan suku-suku Pamona, Tojo, dan Mori.⁸

Dari hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa penduduk asli di Sulawesi tengah adalah para migran yang berasal dari daerah lain. Mereka masuk ke Sulawesi tengah dari dua arah, yaitu dari arah utara dengan membawa kebudayaan megalitik dan dari arah selatan dengan kebudayaan perunggu. Suku-suku dengan kebudayaan megalitik hidup di daerah dataran-dataran tinggi, sementara suku-suku dengan kebudayaan perunggu hidup di daerah dataran-dataran rendah. Suku-suku di dataran tinggi dengan kebudayaan megalitiknya mempunyai ciri masyarakat yang animistik dan egalitarian. Sementara suku-suku yang ada di dataran rendah sudah mulai mempraktekan kepercayaan keagamaan yang politeistik dan mengenal stratifikasi sosial.⁹

Sejarah penyebaran dan perkembangan suku-suku di Sulawesi tengah dapat diketahui juga melalui cerita rakyat yang beredar luas di Sulawesi Tengah. Menurut cerita tersebut, setelah tiba di Sulawesi tengah, suku-suku pendatang pada mulanya menetap bersama di dataran sebelah utara danau Poso, tepatnya di sebuah kawasan dataran di sekitar hulu sebelah barat sungai Poso yang disebut *Pamona*, artinya permulaannya. Di *Pamona* mereka mengembangkan kehidupan masyarakat, kebudayaan dan peradaban di bawah

⁸ Sadi, et.al., *Gerakan Pemuda...*, 31.

⁹ Ibid., 32.

kekuasaan seorang raja yang bernama Rumbenunu. Kawasan itu terlalu sempit, sehingga ketika terjadi penambahan populasi sulit bagi mereka untuk mendapatkan makanan. Untuk mencegah perang di antara mereka maka dibuatlah kesepakatan untuk berpisah dan mencari daerah-daerah baru yang lebih luas. Sekelompok bergerak ke arah barat, melewati celah-celah pegunungan hingga sampai di dataran tinggi Lore. Mereka kemudian disebut sebagai suku-suku Pekurehua, Bada, dan Besoa. Sebagian bergerak ke arah timur melewati daerah-daerah berbukit hingga sampai di dataran Mori yang luas. Mereka kemudian disebut suku-suku Mori. Sementara sebagian lagi tetap bertahan di sekitar danau Poso dan tepian aliran sungai Poso. Mereka tetap disebut suku Pamona. Kesepakatan perpisahan ini ditandai dengan penanaman batu-batu perpisahan di sebuah bukit di tepi danau Poso, di mana terdapat hulu sungai Poso. Masyarakat setempat menyebut batu-batu perpisahan ini *Watu mPoga'a*.¹⁰

Dari teori-teori dan cerita rakyat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk asli di Poso Sulawesi tengah adalah hasil migrasi dan penyebaran penduduk di waktu yang lampau. Ketika mereka tiba di Sulawesi tengah, daerah pertama yang menjadi tujuan mereka adalah dataran yang luas di sekitar danau Poso. Hal ini dapat dipahami karena danau tersebut menjadi sumber air dan makanan bagi mereka. Setelah terjadi penambahan jumlah populasi, mereka menyebar ke daerah-daerah lain di sekitar Sulawesi tengah dan berkembang menjadi kelompok-kelompok suku. Kondisi geografis yang bergunung-gunung dengan hutan-hutan yang lebat membuat suku-suku ini terisolir satu sama lain sehingga

¹⁰ Batu perpisahan ini masih ada hingga sekarang di sebuah bukit di tepi danau Poso. Tetapi karena tidak terawat dengan baik, tinggal 3 tiang batu yang tetap berdiri. Yang lainnya telah rusak dan patah. Tempat berdirinya batu perpisahan ini oleh penduduk asli percayai sebagai tempat pertama, sebelum suku-suku itu berpecah. Observasi di Kelurahan Pamona Tentena tanggal 19 Noveber 2013.

mereka berkembang menjadi kelompok-kelompok dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda. Ketika Albert Christian Kruyt tiba di Poso pada tahun 1892 dan bergaul dengan suku-suku ini, dia menemukan perbedaan budaya, bahasa, dan watak di antara mereka.¹¹ Orang-orang Mori cenderung lebih terbuka menerima pengaruh dari luar dan mudah melepaskan tradisi-tradisi nenek moyang, sedangkan orang-orang Pamona lebih tertutup dan sangat memegang tradisi leluhurnya.¹²

Walaupun demikian suku-suku di Poso memiliki kesamaan, yakni kehidupan bersama-sama secara berkelompok-kelompok di sebuah tempat yang berpagar keliling yang disebut *lipu*. Kruyt melihat bahwa *lipu* telah menjadi satu kelompok yang kuat karena dua faktor utama, yaitu adanya pertalian darah dan persekutuan nasib.¹³ Oleh karena itu *lipu* di satu sisi mengartikan suatu tempat berkubu di mana orang-orang yang memiliki pertalian darah dan kesamaan nasib berkumpul dan mempertahankan diri dari serangan kelompok suku lain. Pada sisi lain, *lipu* mengartikan kehidupan kelompok yang dirayakan melalui upacara-upacara adat dan magis.

Kebanyakan *lipu* terletak di puncak-puncak bukit dan di sekelilingnya dibuat tembok tanah yang ditanami tumbuhan bambu. Di lereng bukit selalu ada sungai atau mata air tempat orang mandi, mencuci, dan mengambil air untuk minum. Di setiap *lipu* biasanya ada seorang pandai besi yang membangun rumahnya di kaki bukit. Bila ada orang yang melewati suatu kawasan *lipu* atau mempunyai urusan dengan orang-orang di dalam suatu *lipu* maka mereka biasanya hanya diperkenankan untuk bermalam di rumah sang pandai besi. Hanya orang-

¹¹ J. Kruyt, *Kabar Keselamatan di Poso*, diterjemahkan oleh P.S. Naipospos (Jakarta: BPK Gunung Mulia 1977), 20.

¹²Ibid., 22.

¹³Ibid., 25.

orang tertentu yang diizinkan naik ke *lipu* dan bermalam di sana. Pendetang umum akan diberi tempat di kuil desa yang disebut *Lobo* atau di lantai bawah lumbung padi. Pendetang khusus atau yang memiliki pertalian darah atau kekerabatan karena perkawinan akan tinggal di rumah-rumah penduduk. Perang antar kelompok-kelompok suku, kelaparan akibat kemarau panjang, dan wabah penyakit yang menimpa kehidupan di suatu *lipu* membuat kehidupan kelompok mereka semakin kuat. Di dalam *lipu* inilah dilakukan berbagai ritual adat dan keagamaan, seperti perkawinan, perkabungan, inisiasi, pentahbisan imam, upacara-upacara magi, dll.¹⁴

Sampai dengan pertengahan abad kesembilan belas, suku-suku di Sulawesi tengah ini hidup terisolir dari dunia luar. Kehadiran pemerintah Kolonial Belanda di Nusantara tidak mempengaruhi kehidupan mereka karena lokasi mereka yang jauh di pedalaman dan hidup di celah-celah bukit. Pengaruh agama-agama besar seperti Islam juga tidak ditemukan pada suku-suku ini, kecuali suku-suku Bungku yang mendiami daerah pesisir selatan teluk Tolo, dan suku-suku Tojo yang mendiami daerah pesisir timur teluk Tomini. Sedangkan suku-suku Mori, Pamona, Pekurehua, Besoa, Bada, dan Ta'a yang hidup di pedalaman Sulawesi tengah hidup dengan kebudayaan dan agama asli mereka masing-masing.

Keadaan sosial budaya tersebut di atas mengalami perubahan yang sangat berarti ketika kekristenan masuk ke Sulawesi Tengah pada akhir abad sembilan belas. Kekristenan berhasil menyatukan suku-suku ini di bawah satu keadaan rohani yang sama yang disebut Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Perubahan sosial budaya ini kemudian dipertegas oleh efektifnya Pemerintah Kolonial Belanda di daerah itu.

¹⁴ibid., 24.

Sejak saat itu suku-suku ini mengalami modernisasi, terutama melalui proses pendidikan dan kehidupan beragama.

4. Perjumpaan Islam dan Kristen di Poso

4.1. Masuknya Islam di Poso

Menurut Tim Peneliti Sejarah Poso, sejarah masuknya Islam di Tanah Poso berkaitan erat dengan berdiri dan berkembangnya dua kerajaan Islam di daerah Timur Nusantara pada abad ke XV. Kerajaan Islam itu adalah Kerajaan Bone di Sulawesi Selatan dan Kerajaan Ternate di sebelah Utara pulau Sulawesi. Kedua kerajaan Islam ini berdiri dan berkembang sebagai perpaduan dari tiga kekuatan, yakni politik, ekonomi, dan agama. Itulah sebabnya masuknya Islam di Tanah Poso telah terjadi melalui kombinasi ketiga kepentingan tersebut dan dapat dibagi ke dalam tiga fase, yaitu fase yang dilakukan oleh pedagang Islam Bugis, fase yang dipengaruhi oleh Kesultanan Ternate, dan fase yang dilakukan oleh orang-orang Arab.¹⁵ Berikut akan dipaparkan secara singkat ketiga fase tersebut.

i) Fase Pedagang Islam Bugis

Fase ini dimulai dengan masuknya para pedagang Bugis ke beberapa wilayah tanah Poso, yaitu Bungku (Selatan), Tojo (Timur), dan Poso Pesisir (Barat). Islam masuk di wilayah-wilayah tersebut sekitar abad XVI melalui kedatangan para pelaut dan pedagang Bugis dari kerajaan Bone. Namun demikian, pada fase ini belum ada usaha penyebaran Islam secara sengaja kepada para penduduk Poso. Oleh sebab itu, Islam hanya berkembang di daerah-daerah pelabuhan, tempat

¹⁵ Hasan & Darwis (Ed.), *Sejarah Poso* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 59.

terjadinya jual beli antara penduduk lokal dan pedagang Bugis. Perkembangan di daerah pesisir tersebut pada umumnya disebabkan oleh perkawinan antara para pedagang Bugis dengan perempuan-perempuan setempat, sehingga sampai abad ke XIX semua pelabuhan dan tempat perdagangan di daerah pesisir pantai teluk Tomini dan teluk Tolo sudah dimasuki oleh Islam. Sedangkan daerah pedalaman masih menganut kepercayaan agama suku mereka masing-masing. Dengan kata lain, penduduk pesisir yang terdiri dari orang-orang Bungku, Tojo, dan Kaili telah mengenal Islam. Sedangkan orang-orang Pamona, Mori, dan Lore masih dengan agama asli mereka.¹⁶

ii) Fase Kesultanan Ternate

Fase pedagang Islam Bugis, kendatipun belum memberi perkembangan yang berarti bagi Islam di Poso, telah menjadi dasar pertumbuhan Islam di abad-abad kemudian. Seiring pengaruh politik dan ekonomi kerajaan Ternate yang semakin kuat dari Utara, daerah pesisir teluk Tomini dan teluk Tolo tidak dapat menutup diri dari kedatangan para pelaut dan pasukan kerajaan Ternate. Ekspansi kerajaan Ternate dengan kekuatan maritimnya ke teluk Tomini dan teluk Tolo mencapai puncaknya pada tahun 1563 – 1580 di masa pemerintahan Sultan Hairun dan Sultan Baabulah. Pada masa ini, kerajaan Ternate berhasil mengislamkan Gorontalo, Moutong, Tinombo, Kasimbar, Parigi, Sausu, Tojo, Ampana, dan kepulauan Una-Una Togian. Semua pelabuhan dagang tersebut terletak di sepanjang pesisir pantai Teluk Tomini, mulai dari arah Barat sampai ke Timur. Pada fase inilah Islam berkembang secara pesat yang ditandai oleh kemunculan beberapa kerajaan Islam lokal di Sulawesi Tengah, yaitu

¹⁶ibid., 63.

kerajaan Sigi, kerajaan Tojo, dan kerajaan Bungku. Namun semua kerajaan Islam ini secara politik, ekonomi, dan agama takluk pada kerajaan Ternate. Menjelang abad ke XVII kerajaan Ternate mulai surut oleh kekuatan Portugis dan Belanda. Keadaan ini memberi peluang bagi sebuah kerajaan Islam lokal di Sulawesi Selatan untuk berkembang dan memperluas pengaruhnya di Poso, itulah Kerajaan Luwu, dengan pusatnya di Palopo. Sejak saat itu ada persaingan politik dan ekonomi antara kerajaan Luwu di sebelah selatan dan kerajaan Sigi di sebelah utara.¹⁷

iii) Fase Pedagang Arab

Fase ini diawali dengan datangnya seorang Ustad Arab bernama Sayyid Idrus bin Salim Aljufrie ke Poso. Sebelum datang ke Sulawesi Tengah, ia menjadi mubaliq dan pedagang di Jakarta, Solo, Jombang, dan terakhir di Pekalongan. Kemudian ia Hijrah ke Makasar, Maros, Donggala, dan Manado. Pada tahun 1929 Sayyid Idrus tiba di Palu dan mendirikan sebuah Madrasah. Kemudian ia mengadakan pendekatan kepada para raja beberapa kerajaan Islam lokal di Sulawesi Tengah untuk mendapatkan murid-murid di Madrasah yang dibangunnya. Upaya Sayyid Idrus mendapat sambutan baik dari para raja dan masyarakat. Melalui jalan inilah Islam berkembang secara kualitatif di kalangan masyarakat pesisir pantai. Sehingga pada tahun 1941 didirikanlah Madrasah Alchairat di Poso.

4.2. Masuknya Keristenan di Poso

Kekristenan masuk ke Poso pada akhir abad ke XIX melalui sebuah usaha yang terencana dan terorganisir oleh sebuah lembaga penginjilan dari Belanda. Upaya itu tidak

¹⁷ibid., 75.

dapat dilepaskan dari seorang tokoh penginjil yang bernama Albert Christian Kruyt. Ia lahir di Mojowarno Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 1869. Ayahnya Johanes Kruyt adalah juga seorang penginjil yang bertugas di Jawa Timur. Pada tahun 1877 - 1889 A.C. Kruyt mengikuti pendidikan Teologi di Belanda. Sesudah menyelesaikan pendidikan teologi tersebut ia ditahbiskan menjadi pendeta penginjil oleh *Nederlansch Zendeling Genootschap* (NZG) pada tahun 1890. Pada bulan April 1891 A.C. Kruyt bersama istrinya Johanna Moulijn diutus ke Manado untuk selanjutnya bekerja di Gorontalo. Selama kurang lebih setahun ia bekerja di Gorontalo dengan hasil yang tidak kelihatan. Hal itu disebabkan oleh sudah kuatnya Islam berakar di dalam kehidupan orang Gorontalo. Kemudian atas informasi dan usul dari Pdt. Th. Wielandt di Manado dan Baron van Hoevel Asisten Residen Gorontalo, A.C. Kruyt mengajukan permohonan kepada lembaga NZG di Rotterdam untuk mengalihkan tugasnya dari Gorontalo ke Poso. Permohonan Kruyt disetujui oleh NZG dan pada waktu yang sama Residen Manado memberikan izin baginya untuk bekerja di Poso. Atas semuanya itu, maka pada tanggal 4 Februari 1892 A.C. Kruyt mendapat izin bekerja di Poso dan pada tanggal 16 Februari ia tiba di Poso dengan diantar oleh Asisten Residen Gorontalo Baron van Hoevell.¹⁸ Pekerjaan penginjilan di tanah Poso dapat dibagi dalam dua periode, yaitu:

i) Periode Persiapan 1892 - 1904

Periode persiapan dimulai pada tahun 1892, ketika permohonan A.C. Kruyt disetujui oleh lembaga zending di Belanda dan Pemerintah Hindia Belanda di Manado. Pada tahun itu juga A.C. Kruyt mengunjungi Poso untuk pertama kalinya dan berkenalan dengan penduduk di sekitar Poso yang

¹⁸ Sadi, et.al., *Gerakan Pemuda...*, 53.

sebagian di antara mereka telah beragama Islam. Namun A. C. Kruyt telah mendapat informasi bahwa di pedalaman ada penduduk asli yang masih dengan kepercayaan suku mereka. Penduduk asli inilah yang menjadi pusat perhatian A. C. Kruyt selama kurang lebih empat puluh tahun.

Pada masa persiapan ini A. C. Kruyt belum secara terang terang memperkenalkan kekristenan dan mengajak penduduk untuk menjadi Kristen. Apa yang dilakukannya adalah mempelajari budaya, adat, dan bahasa orang Poso, menjalin hubungan yang baik dengan para pemuka masyarakat dan ketua suku, memfasilitasi proses perdamaian antar suku-suku yang terlibat dalam pertikaian, membantu Pemerintah Kolonial Belanda dalam menciptakan ketertiban masyarakat, mengobati orang-orang sakit, dan merintis pembukaan sekolah. Dalam periode ini A.C. Kruyt dibantu oleh seorang ahli linguistik dan etnografi dari Belanda yang bernama N. Adriani.

Kehadiran A. C. Kruyt beserta keluarganya dan N. Adriani ternyata mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Dengan cepat mereka dapat diterima dalam pergaulan masyarakat dan sebaliknya A. C. Kruyt dan Adriani dapat menguasai bahasa setempat dan mengenal budaya dan adat istiadatnya. Bahkan A. C. Kruyt memiliki seorang sahabat dekat yang adalah pemimpin sub suku Pebato dari rumpun suku Pamona. Namun demikian sampai dengan tahun 1909 atau setelah 17 tahun tinggal dan bekerja di Poso, belum satu orangpun yang menyatakan diri bersedia menjadi Kristen. Sementara A. C. Kruyt tidak memaksa penduduk, melainkan dengan sabar menanti apabila ada seorang yang cukup berpengaruh menyatakan diri secara sukarela untuk dibaptis.

ii) Periode Pertumbuhan 1909 - sekarang

Pada tahun 1905-1906 A. C. Kruyt melakukan perjalanan mengunjungi Halmahera, Jawa, Kalimantan, Sumatra, dan Nias, serta kembali ke Belanda. Pada bulan Mei 1907 ia kembali lagi ke Poso. Ketika itu orang-orang mulai tertarik menghadiri kebaktian hari minggu di rumahnya. Apalagi sang kepala suku mereka, yang adalah juga sahabat karib A.C. Kruyt yaitu Papa i Wunte, juga telah menyatakan kesediaannya untuk masuk Kristen. Pada tanggal 25 Desember 1909 dilaksanakanlah pembaptisan pertama di sungai Puna desa Kasiguncu. Sebanyak 100 orang dewasa menerima baptisan dan disusul 66 orang pada keesokan harinya.¹⁹ Selanjutnya dalam setiap ibadah yang dilakukan selalu saja ada orang yang menerima baptisan. Sehingga jemaat awal ini semakin hari semakin bertumbuh. Ini adalah titik awal dari sebuah periode yang baru dalam sejarah masuknya Kekristenan di tanah Poso.

Setelah terbentuk jemaat awal di Kasiguncu, maka pekerjaan penginjilan yang dipimpin oleh A.C. Kruyt semakin meminta perhatian. Kruyt harus melakukan upaya untuk memelihara jemaat yang baru saja terbentuk tersebut sementara ia juga harus mengawasi dan mengurus beberapa wilayah penginjilan di pedalaman Lore, serta sekolah yang dibangunnya.

5. Gereja Kristen Sulawesi Tengah

Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) adalah sebuah organisasi gereja yang terdapat di Propinsi Sulawesi Tengah. Gereja ini berdiri pada tanggal 18 Oktober 1947 dengan pusat sinodanya di kota kecil yang bernama Tentena. Kota Tentena

¹⁹ Kruyt, *Kabar Keselamatan...*, 34.

adalah sebuah kota kecamatan yang terletak di tepi danau Poso dengan jarak 56 km dari Ibu kota kabupaten Poso.

Gereja Kristen Sulawesi Tengah merupakan wujud persekutuan sinodal dari kurang lebih 400 jemaat lokal Kristen Protestan yang tersebar di Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kotamadya Palu di wilayah provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, GKST juga memiliki kurang lebih 60 jemaat lokal di kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.²⁰ Karena penyebaran jemaatnya yang mencakup delapan wilayah kabupaten dan dua wilayah propinsi maka GKST tergolong gereja dengan wilayah pelayanan terluas di pulau Sulawesi.

Menurut laporan Komisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) GKST, sampai dengan tahun 2006 anggota GKST berjumlah 576.424 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 548.532 tinggal di wilayah propinsi Sulawesi Tengah dan sebanyak 31.638 orang tinggal di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.²¹ Menurut data pada website resmi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah tercatat jumlah penduduk Sulawesi Tengah sampai tahun 2006 adalah sebanyak 2.215.449 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa anggota GKST mencapai 25,98 % total penduduk Sulawesi Tengah.

Secara historis jemaat-jemaat yang menjadi cikal bakal berdirinya GKST pada tahun 1947 adalah hasil penginjilan sebuah badan misi kekristenan dari Belanda yang bernama *Nederlandsch Zendelingsgenootschap* (NZG) atau Perserikatan Utusan-Utusan Injil Belanda. Pada bulan Juli 1890 NZG

²⁰ Majelis Sinode GKST, *Laporan Pelayanan Majelis Sinode GKST Periode 2004 – 2008*. (Tentena: Panitia Pelaksana Sidang Sinode GKST ke-43, 2008.), 23-24.

²¹ Komisi Litbang GKST, *Laporan Komisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) GKST pada Sidang Sinode GKST ke-43*. (Tentena: Panitia Pelaksana Sidang Sinode GKST ke-43, 2008), 7.

mengutus seorang missionaris yang bernama Albert Christian Kruyt (1869 – 1949) ke Poso dalam rangka pekabaran Injil. Ia tiba di Poso pada tahun 1892, setelah melewati Manado dan Gorontalo.²² Menyusul kemudian pada bulan Maret 1895 NZG mengutus seorang ahli bahasa dan etnolog bernama Nicholas Adriani untuk membantu A.C. Kruyt dalam memahami budaya dan bahasa setempat, demi kepentingan pembangunan sekolah, proses pengajaran, dan penterjemahan Alkitab.²³ Mereka berdua, A.C. Kruyt dan N. Adriani, serta beberapa tenaga misi lainnya yang diutus oleh NZG kemudian memulai pekabaran Injil terhadap suku Pamona di daerah sekitar muara sungai Poso sampai ke dataran tinggi di sekitar Danau Poso. Upaya pertama yang mereka lakukan adalah mempelajari bahasa, budaya, dan menjalin persahabatan dengan para *Tadulako* dan *Wa'a ngKabosenya*²⁴ di Poso. Selain itu mereka mendirikan sekolah sebagai tempat mengajar anak-anak membaca dan menghitung.

Setelah menunggu selama tujuh belas tahun sejak kedatangannya di sana, akhirnya pada tanggal 26 Desember

²² Kruyt, *Kabar Keselamatan di Poso....*, 84. Sebetulnya A.C. Kruyt diutus oleh NZG untuk bekerja di Gorontalo. Kurang lebih setahun (April 1891 – Februari 1892) ia mengunjungi Gorontalo dan bekerja di sana. Tetapi akhirnya ia memutuskan untuk menghentikan pekerjaan penginjilan di Gorontalo dengan alasan bahwa agama Islam sudah sangat berakar di kalangan orang Gorontalo. Kemudian ia mengusulkan kepada pusat NZG di Belanda agar merekomendasikan perpindahannya ke Poso untuk bekerja di antara penduduk yang ada di pedalaman Sulawesi Tengah dan yang masih memeluk agama suku mereka. Atas rekomendasi pusat NZG di Belanda dan persetujuan Residen Hindia Belanda di Manado, maka A.C. Kruyt berangkat ke Poso. A.C. Kruyt mempunyai seorang anak yang meneruskan pekerjaannya di Poso. Ia bernama J. Kruyt dan yang menulis buku *Kabar Keselamatan di Poso*.

²³ Lukman Nadjamudin, *Dari Animisme ke Monoteisme, Kristenisasi di Poso 1892 – 1942* (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2002), 60. Hasil pekerjaan Adriani berupa Perjanjian Baru dalam Bahasa Pamona akhirnya diterbitkan pada tahun 1935 oleh Lembaga Alkitab Belanda. Adriani sendiri akhirnya meninggal pada tanggal 1 Mei 1926 dan dikuburkan di Poso. Pemerintah Kabupaten Poso menjadikan kuburnya sebagai salah satu cagar budaya.

²⁴ '*Tadulako*' adalah pemimpin-pemimpin suku atau klan di Poso. Sedangkan '*wa'a ngKabose*' adalah tua-tua kampung dan dewan adat yang bersama *Tadulako* memimpin suku-suku di Poso. Lih. Kruyt, *Kabar Keselamatan di Poso....*, 25-26.

1909, baptisan pertama dilaksanakan terhadap *Papa I Wunte, Tadulako* suku Pamona dari klan Pebato, bersama keluarga dan 168 anggota klannya.²⁵ Baptisan pertama ini menjadi momentum bagi proses penerimaan iman Kristen di antara suku Pamona Poso. Dari suku Pamona mereka bergerak ke sebelah Barat terhadap suku Pekurehua, Besoa, Bada, dan Rampi, kemudian pada tahun 1914 mereka bergerak ke sebelah timur untuk mengunjungi suku-suku Mori. Perluasan penyebaran agama Kristen oleh NZG berakhir pada tahun 1926 terhadap suku-suku terpencar yang hidup terasing di puncak-puncak gunung pedalaman Sulawesi Tengah.²⁶

Sesuai dengan sifat kolektif suku-suku di Poso, maka seluruh orang Poso dari suku Pamona, Pekurehua, Besoa, Bada, Rampi, dan Mori telah memeluk agama Kristen sampai dengan akhir dekade ketiga abad dua puluh. Sedangkan suku-suku Wana, sebagian masih memeluk agama asli mereka, terutama yang tinggal secara terasing dan terpencar di pedalaman pegunungan Sulawesi Tengah, khususnya wilayah kecamatan Ulu Bongka, Bungku Utara, dan Barone Kabupaten Morowali.²⁷ Dari sejarah ini dapat diketahui bahwa Gereja Kristen Sulawesi Tengah adalah gereja yang beranggotakan beberapa suku yang mendiami wilayah pedalaman dan dataran-dataran tinggi di Sulawesi tengah, yaitu suku Pamona, suku Pekurehua, Besoa, Bada, Rampi, Mori, dan Wana.²⁸

²⁵Ibid., 161.

²⁶Nadjamudin, *Dari Animisme ke Monoteisme, Kristenisasi di Poso...*, 157.

²⁷Michael R. Dove (Ed.), *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dan Modernisasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 7.

²⁸ Setelah GKST berdiri pada tahun 1947, Pekerjaan Pekabaran Injil dilanjutkan oleh sebuah komisi khusus yang disebut Komisi Pekabaran Injil GKST dalam kerja sama dengan Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPM) GKST dan Yayasan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Yapkesmas) GKST yang bekerja di komunitas suku-suku terasing di pedalaman Sulawesi Tengah, yakni suku Laudje dan suku Ta'a di Kabupaten Parigi Moutong, dan suku Da'a di kabupaten Donggala wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Lih. A.R. Tobondo, "Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah GKST" dalam Majelis Sinode GKST, *Wajah GKST* (Tentena: Panitia Perayaan 100 tahun Injil masuk Tana Poso, 1992), 164 - 170.

Sampai dengan akhir abad ke-19, terdapat lima kerajaan di Poso, yaitu Kerajaan Poso, Kerajaan Lore, Kerajaan Tojo, Kerajaan Bungku, dan Kerajaan Mori.²⁹ Dua dari lima kerajaan ini, yaitu Tojo dan Bungku memeluk agama Islam dan menetap di daerah pesisir pantai. Orang Tojo mendiami pesisir pantai teluk Tomini dan orang Bungku mendiami pesisir pantai teluk Tolo. Melalui jalur laut mereka sering melakukan kontak dagang dengan beberapa kerajaan Islam di sekitarnya, seperti Kerajaan Sigi dan Gorontalo di Utara dan Kerajaan Bone serta Luwu di Selatan. Bahkan mereka menjadi koloni dari dua kerajaan Islam utama di Sulawesi pada abad ke-19, yaitu Kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan dan kerajaan Sigi di Sulawesi Barat. Sedangkan suku-suku Pamona, Pekurehua, Besoa, Bada, Rampi dan Mori mendiami dataran-dataran rendah dan tinggi di pedalaman Sulawesi Tengah. Mereka kurang mengalami kontak dengan kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Itulah sebabnya sampai akhir abad ke-19 ketiga suku-suku ini masih dengan kepercayaan asli mereka.³⁰

Dalam peta demografi dan wilayah administrasi saat ini dapat diketahui bahwa warga GKST yang berasal dari suku Pamona dan suku Pekurehua, Besoa, dan Bada adalah penduduk utama di wilayah kabupaten Poso, suku Mori dan suku Wana adalah penduduk utama di wilayah kabupaten Morowali, suku Laudje bersama suku Ta'a adalah penduduk asli di kabupaten Parigi Moutong, dan akhirnya suku Da'a adalah penduduk asli di kabupaten Donggala dan Sigi. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa GKST beranggotakan suku-suku asli yang ada di Sulawesi Tengah. GKST tidak saja memperkenalkan Kekristenan terhadap mereka, tetapi sekaligus juga menjadikan dirinya sebagai wadah pemersatu

²⁹ Depdikbud Kanwil Sulteng, *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah*....., 57-58.

³⁰ Hasan & Darwis (Ed.), *Sejarah Poso*.....,59-79.

suku-suku tersebut, yang sebelum kekristenan datang di sana, sering berperang satu terhadap yang lain.³¹

6. GKST dan Tantangan Sosial Politiknya

Sejarah kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) sejak dekade ahir abad ke-19 hingga saat ini telah diperhadapkan dengan beberapa keadaan sosial politik yang di satu pihak telah membawa GKST pada saat-saat yang sulit dan sukar, tetapi di lain pihak telah memberi ujian bagi GKST untuk belajar berefleksi tentang iman dan matra sosialnya di tengah masyarakat.

6.1. GKST di zaman Pendudukan Jepang (1942 - 1945)

Memasuki abad ke-20, sejarah imperialisme dan kolonialisme Barat di Asia memasuki babak baru, ketika ia harus berhadapan dengan bangkitnya nasionalisme Asia, menyusul kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia di tahun 1905. Pada tanggal 27 Mei tahun itu, di selat Tsujima, Jepang menghancurkan armada Rusia dengan menenggelamkan 35 kapal perangnya. Kemenangan Jepang atas Rusia ini dianggap sebagai momentum untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat.³² Sejak saat itu Jepang menjadi sebuah negara besar di Asia Timur dan kemudian turut terlibat secara aktif dalam Perang Dunia II dan menguasai Asia Timur serta Asia Tenggara.

Pada tanggal 26 Pebruari 1942, armada laut Sekutu di laut Jawa, yang terdiri dari Inggris, Amerika, dan Belanda berhasil dikalahkan oleh Angkatan Laut Jepang. Namun sebelum itu, setelah Jepang merebut Filipina, pada tanggal 11

³¹ Kruyt, *Kabar keselamatan di Poso*, 92 - 94.

³² Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia* (Jakarta: P.T. Pembangunan, 1982), 8.

Januari 1942 Angkatan Laut Jepang mendarat di Manado Sulawesi Utara. Pendaratan itu mendesak Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Manado untuk menyingkir ke Poso. Penyingkiran itu terjadi dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Residen Hirschman. Ia menyingkir ke Gorontalo segera setelah pendaratan Jepang di Manado. Mereka bertolak dari Gorontalo ke Parigi dengan kapal laut pada tanggal 21 Januari 1942. Keesokan harinya mereka melanjutkan pelayaran ke Poso. Kelompok kedua menyingkir langsung dari salah satu desa tempat persembunyian mereka yang bernama Taloeda di Sulawesi Utara pada tanggal 21 Pebruari 1942. Kelompok ini dievakuasi oleh 12 orang pasukan penyelamat Belanda. Mereka berlayar secara langsung ke Poso. Kelompok ketiga adalah sisa pasukan Hindia Belanda yang masih bergerilya di hutan-hutan Minahasa Sulawesi Utara. Pada tanggal 25 Pebruari 1942, markas mereka di hutan Lijon Minahasa diserang oleh tentara Jepang, sehingga mereka bergerilya dan melarikan diri lewat jalur darat menuju ke Bualemo di Sulawesi Tengah.³³

Pendaratan Angkatan Laut Jepang di Manado mengakibatkan penyingkiran Pemerintah Hindia Belanda beserta tentaranya ke Sulawesi Tengah. Pada saat itu Poso menjadi pusat pengungsian Pemerintah Hindia Belanda dan tentaranya. Di Sulawesi Tengah, mereka menyebar di beberapa daerah seperti Ampana, Poso, Palu, Bada, dan Kolonodale. Formasi pertahanan Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Tengah selama PD II berlangsung hingga tanggal 5 Maret 1942 dengan kota pertahanan terakhir mereka di Kolonodale,³⁴ sebuah kota kecil yang terletak di ujung celah

³³ Hasan & Darwis (Ed.), *Sejarah Poso...*, 226.

³⁴ *Ibid.*, 228

sempit teluk Tolo dan tersembunyi oleh bukit-bukit terjal di sekitarnya.

Dua hari setelah serangan udara Angkatan Laut Jepang atas kota Kolonodale, kubu pertahanan terakhir pasukan Belanda di Sulawesi Tengah, maka pada tanggal 7 Maret 1942 Jepang mengeluarkan Undang-Undang No 1 yang berisi ketentuan bahwa sistem tata masyarakat yang tidak bertentangan dengan kepentingan tentara Jepang tetap diberlakukan.³⁵ Sejak itu tentara Jepang menduduki ke wilayah Sulawesi Tengah, seperti ke Toli-Toli, Palu, Donggala, Poso, Bungku, Kolonodale, dan Luwuk Banggai. Pendudukan itu bertujuan untuk mengejar tentara Hindia Belanda yang lari dan bergerilya di hutan-hutan Sulawesi Tengah dan persiapan untuk menyerbu kekuatan Sekutu yang ada di Sulawesi Selatan (Makasar) lewat jalur darat.³⁶ Dengan datangnya pemerintahan Jepang, maka Sulawesi Tengah secara administrasi beralih dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda ke kekuasaan tentara Jepang. Pada tanggal 10 April 1942 Tentara Jepang menguasai seluruh wilayah Sulawesi Tengah dan mengambil alih kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda atas wilayah tersebut.³⁷

Kedadaan sosial politik ini mempengaruhi perkembangan jemaat-jemaat Kristen hasil penginjilan lembaga zending Belanda (NZG). Pada masa ini GKST belum berdiri sebagai sebuah organisasi sinodal, kecuali jemaat-jemaat lokal yang langsung dipimpin dan dibina oleh tenaga-tenaga misi dari NZG. Mengamati dan mencermati perkembangan situasi PD II dan mengantisipasi masuknya tentara Jepang di Poso maka pimpinan-pimpinan NZG yang ada di Poso membentuk dan menetapkan Majelis Jemaat pada

³⁵ Depdikbud Kanwil Sulteng, *Sejarah Daerah Sulawesi Tengah.*, 145.

³⁶ Hasan & Darwis (Ed.), *Sejarah Poso...*, 229.

³⁷ Kruyt, *Kabar Keselamatan di Poso...*, 427.

tiap-tiap jemaat dan mengangkat serta menetapkan Pendeta Klasis. Pendeta Klasis itu diangkat dari guru sekolah dan kepada mereka diberikan hak untuk melaksanakan pelayanan sakramen. Menjelang masuknya Jepang ke Poso dibentuklah empat belas klasis di enam wilayah kesukuan, yaitu:

- a. Wilayah Poso Pamona dengan empat klasis: Kasiguncu yang diketuai oleh Guru P. Sigilipu, Lage Poso yang diketuai oleh Guru T. Timboko, Tentena yang diketuai oleh Guru T. Rabinto, dan Pendolo yang diketuai oleh Guru T. Moili.
- b. Wilayah Lore yang mencakup Pekurehua, Besoa, Bada, dan Rampi dengan tiga klasis: Bada yang diketuai oleh Guru P. Pogo, Napu yang diketuai oleh Guru P. Kabi, dan Lebani Rampi yang diketuai oleh Guru Injil F. Lumentut.
- c. Wilayah Mori dengan tiga klasis: Korololama yang diketuai oleh Guru M. Tampodinggo, Wawopada yang diketuai oleh Guru L. Lolo, dan Tomata yang diketuai oleh Guru L. Banatau.
- d. Wilayah Lembo Malili di Sulawesi Selatan dengan dua klasis: Kawata yang diketuai oleh Guru S. Mokalu dan Maleku yang diketuai oleh Guru U. Mojepe.
- e. Wilayah Wana dengan dua guru Injil yaitu Guru Injil M. Tamauka dan Guru Injil T. Sepatondu.

Kepada para ketua klasis ini diberikan hak untuk memakai uang sekolah dan uang persembahan jemaat untuk jaminan hidup keluarganya. Hal ini dilakukan karena kesulitan ekonomi pada masa pendudukan Jepang.³⁸

Bersamaan dengan kemenangan Jepang atas Sekutu di Asia Tenggara, di Eropa, pasukan Nazi Jerman bergerak dan

³⁸ H. Meranga, "Jemaat Kristen di Tana Poso pada masa pendudukan Jepang" dalam Majelis Sinode GKST, *Wajah GKST* (Tentena: Panitia Perayaan 100 Tahun, 1991), 30 -31.

menduduki Belanda. Akibatnya para misionaris NZG yang bekerja di Indonesia mengalami kesulitan untuk melakukan hubungan dengan induk NZG di Belanda. Mereka kehilangan dukungan finansial untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan pendampingan jemaat-jemaat yang baru terbentuk. Sementara itu, setelah pemerintah pendudukan Jepang menguasai Poso, para misionaris NZG yang berbangsa Jerman seperti Riedel dan Hering yang bekerja di wilayah Mori dan Wana diintener ke Makasar dan mereka yang berbangsa Belanda seperti Jan Kruyt dan Perdok yang bekerja di Poso, Pamona, dan Lore ditangkap oleh tentara Jepang dan dibawa ke Manado.³⁹ Akibatnya jemaat-jemaat yang masih begitu muda kehilangan kordinasi dan kepemimpinan para misionaris.

Pada bulan Maret 1944 Jepang menangkap dua puluh satu orang pendeta dan guru sekolah dari Poso dan Mori atas tuduhan memusuhi Jepang dan membantu kembalinya pemerintahan Kolonial Belanda. Sebelas orang dari antara mereka dikirim dan dipenjarakan di Makassar. Dua dari mereka meninggal dalam penjara Jepang di Makassar.⁴⁰ Akibatnya jemaat-jemaat dan para pemimpinnya hidup dalam tekanan dan ketakutan. Kebebasan bergereja sangat dibatasi. Sekolah-sekolah yang diasuh oleh NZG harus dipisahkan dengan urusan gereja. Para guru sekolah yang sekaligus adalah para Pendeta Klasik dan Pimpinan Jemaat dipaksa untuk menjadi guru pemerintah dan meninggalkan jemaat. Pekerjaan penginjilan dan perkumpulan-perkumpulan jemaat dilarang. Ibadah-ibadah jemaat dikurangi dan khotbah sama sekali dilarang. Tentang hal ini, J. Kruyt mencatat: "Apabila

³⁹ Kruyt, *Kabar Keselamatan di Poso*, 426.

⁴⁰ Para Pendeta Klasik yang ditangkap: L. Molindo, M. Tamboeo, J. Pelima, P. Sigilipu (Meninggal di Penjara Jepang Makasar), T. Nggeawu, T. Magido, Pangemanan (Meninggal di Penjara Jepang Makasar), M. Tampodinggo, L. Lolo, M. Poto, dan L. Banatau. Lih. Meranga dalam Majelis Sinode GKST, *Wajah GKST...*, 31.

orang toh mau berkhotbah, maka haruslah khotbah itu dihadapkan dahulu untuk diperiksa oleh orang-orang yang ditunjuk untuk itu.”⁴¹ Akibatnya jemaat-jemaat yang baru saja lahir dan bertumbuh menjadi bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Keadaan ini sedikit mengalami perubahan ketika seorang pendeta Jepang bernama Narumi tiba di Poso pada bulan Juni 1944. Ia berusaha mempengaruhi pemerintah Jepang di Poso agar sedikit memberi keleluasan bagi jemaat-jemaat Kristen di Poso. Salah satu hasil dari upaya Pdt. Narumi adalah dibebaskannya sembilan orang Pendeta Klasis yang dipenjarakan oleh Jepang di Makasar pada November 1945 menyusul Proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.⁴²

Kendatipun situasi sangat sulit dan menegangkan tetapi sejarah membuktikan bahwa jemaat-jemaat ini tidak patah semangat dan bubar. Mereka bertahan dan bahkan bertumbuh dibawah pelayanan dan kepemimpinan para Pendeta Klasis dan Majelis Jemaat. Pimpinan NZG di Poso yang ditangkap oleh Jepang dan dibawa ke Manado, yaitu J. Kruyt, anak dari Albert Christian Kruyt, mengatakan dengan kalimat yang sangat simpatik:

Sesudah keberangkatan kami, para Ketua Klasis bekerja dengan setia. Mereka mengunjungi jemaat-jemaat dan melayankan baptisan dan perjamuan kudus. Ini telah mereka lakukan selama seluruh perang, sepanjang hal ini mungkin bagi mereka. Oleh karena jemaat-jemaat lambat laun semakin jelas kehilangan pemimpin-pemimpin mereka, yaitu guru-guru, maka penatua-penatua telah mengambil alih tugas ini di mana-mana. Dalam kesederhanaan dan kesetiaan telah mereka iringi secara diam-

⁴¹ Kruyt, *Kabar Keselamatan di Poso...*, 428.

⁴² Meranga, dalam Majelis Sinode GKST, *Wajah GKST...*, 37.

diam anggota jemaat yang tinggal berserak-serak di ladang-ladang, dengan pembacaan alkitab dan dengan doa.⁴³

Keadaan yang sulit dan sukar di zaman pendudukan Jepang akhirnya dapat dilalui. Masa itu membuat jemaat-jemaat Kristen di Sulawesi Tengah mulai belajar untuk percaya pada kemampuan mengatur diri sendiri dan tidak selalu bergantung pada gereja induk di negeri Belanda. Hal ini membuktikan juga bahwa gereja dibentuk dan dibesarkan melalui tantangan yang datang dari lingkungan sosialnya. Selama pendudukan Jepang, jemaat-jemaat Kristen di Poso kehilangan hubungan dengan NZG dan gereja-gereja di Belanda. Secara teologis, moral, sosial, politik, dan ekonomis, jemaat-jemaat Kristen di Poso pada masa itu belajar untuk menjadi gereja yang mandiri. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 1947, dua tahun setelah Indonesia merdeka, jemaat-jemaat ini menyatakan diri bersatu secara kelembagaan dan menjadi Gereja Kristen Sulawesi Tengah dengan persetujuan sebagai sebuah Badan Gerejawi dari Pemerintah RI di Jakarta No. 23/7 Oktober 1948. Atas dasar formal itu, maka ditetapkan bahwa wilayah pelayanan GKST meliputi daerah Luwu dan Rampi di Sulawesi Selatan, daerah Luwuk Banggai, daerah Poso dan Mori, daerah Parigi Moutong, dan daerah Palu Donggala di Sulawesi Tengah.

6.2. GKST dalam Masa Pergolakan Politik Kedaerahan (1950-1965)

Pada masa ini GKST sudah berdiri secara formal sebagai sebuah organisasi gereja yang disebut sinode dengan wilayah yang cukup luas di pulau Sulawesi, yaitu mulai dari teluk Bone di sebelah Selatan sampai ke teluk Tomini di

⁴³ Kruyt, *Kabar Keselamatan di Poso...*, 429.

sebelah Utara, dan mulai dari teluk Tolo di sebelah Timur sampai ke dataran-dataran tinggi Lore di sebelah Barat. Secara umum kehidupan jemaat-jemaat GKST kembali dapat ditata dan pelayanan gereja dalam masyarakat melalui pendidikan dapat dihidupkan kembali dalam kerja sama dengan gereja Protestan NHK di Belanda. Hal ini terjadi oleh dukungan situasi dan kondisi sosial politik di era kemerdekaan yang cukup kondusif bagi kehidupan dan kebebasan beragama. Akan tetapi ketika Indonesia mengalami krisis politik pada aras nasional maupun lokal yang diakibatkan oleh ketidakpuasan tokoh-tokoh lokal maupun nasional terhadap dasar ideologis negara dan kebijakan politik-ekonomi pemerintah pusat di Jakarta, kembali jemaat-jemaat GKST memasuki masa yang sulit dan sukar. Oleh karena itu pada bagian ini akan diuraikan tiga pergolakan politik yang dialami oleh GKST.

a. Pergolakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Di Sulawesi Selatan muncul sebuah gerakan politik menentang Pemerintah Pusat di Jakarta. Gerakan ini dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar (1921 - 1965). Ia adalah seorang bekas pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan yang memiliki jabatan terakhir sebagai Wakil Komandan Brigade VI Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dengan pangkat Letnan Kolonel. Sebelum menjadi tentara, Kahar Muzakkar merantau dari Makasar ke Solo. Di sana ia menjadi seorang pedagang dan sempat mengenyam pendidikan di salah satu lembaga Muhammadiyah yang bernama Sekolah Muallimin.⁴⁴ Setelah Proklamasi

⁴⁴ Ruslan dkk., *Mengapa Mereka Memberontak: Dedengkot negara Islam Indonesia* (Yogyakarta: Bio Pustaka, 2008), 50.

Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, Kahar Muzakkar berangkat dari Solo ke Jakarta untuk menghimpun para pemuda Sulawesi Selatan yang ada di Jawa dalam sebuah organisasi pembela kemerdekaan yang bernama Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi (GEPIS) yang kemudian berubah menjadi Angkatan Muda Indonesia Sulawesi (APIS).⁴⁵ Kahar Muzakkar menjadi ketua pada organisasi ini. Kemudian ia meleburkan APIS ke dalam sebuah organisasi baru yang menghimpun semua pemuda dari Sulawesi yang ada di Jawa. Organisasi itu bernama Kebaktian Rakjat Indonesia Sulawesi (KRIS) dan diketuai oleh Bart Ratulangi dengan Kahar Muzakkar sebagai sekretaris I. Mereka terlibat secara aktif dalam perang-perang kemerdekaan menghadapi agresi militer Belanda. Ketika TRI hendak mempersiapkan pembentukan Brigade VI APRI untuk Sulawesi, Kahar Muzakkar diangkat menjadi Komandan Persiapan pembentukan TRI wilayah Sulawesi. Karena itu Kahar Muzakkar ditugaskan di Sulawesi Selatan, tempat kelahirannya.⁴⁶ Belakangan ia kecewa karena setelah Brigade VI dibentuk, Markas Besar APRI mengangkat Letnan Kolonel J.F. Warouw sebagai Komandan sedangkan Kahar Muzakkar menjadi wakilnya.⁴⁷ Inilah awal kekecewaan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan.

Setelah agresi militer Belanda II, pada tanggal 19 Desember 1948 Kahar Muzakkar ditugaskan lagi untuk rencana persiapan pembentukan Komando APRI yang meliputi Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan Sulawesi. Namun

⁴⁵ Ibid., 52

⁴⁶ Anhar Gonggong, *Abdul Qahar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak* (Jakarta: Grasindo, 1992), 101.

⁴⁷ Menurut sumber APRI, walaupun Warouw dan Muzakkar memiliki pangkat yang sama, yaitu Letnan Kolonel, tetapi Warouw mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang militer dan bekas anggota KNIL, sedangkan Kahar Muzakar tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang militer. Ia diangkat menjadi tentara dengan pangkat Letkol karena peran sentralnya dalam Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dalam melawan tentara pendudukan Jepang di tahun 1942 - 1945. Lih. Ibid., 102.

akhirnya rencana itu dibatalkan secara sepihak oleh Mabes APRI di Jakarta.⁴⁸ Akibatnya peran Kahar Muzakkar terkatung-katung dan ia kehilangan jabatan. Ia kembali ke Makassar dan mengusulkan kepada Mabes APRI di Jakarta agar bekas gerilyawannya dari Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) diterima menjadi anggota APRI dan membentuk suatu kesatuan tersendiri dengan nama Brigade Hasanudin. Namun usul itu ditolak. Pemerintah Pusat RI melalui Panglima Teritorial VII/Wirabuana, Kolonel A. Kawilarang menolak kehendak Abdul Kahar muzakkar bersama bekas gerilyawannya dalam perang melawan bala tentara Jepang. Sebagai reaksi terhadap penolakan itu, maka pada tahun 1952 Kahar Muzakkar membentuk kesatuan sendiri dengan nama Tentara keamanan Rakyat (TKR). Pada waktu yang bersamaan, di Jawa Barat Kartosuwirjo membentuk gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dengan tujuan pembentukan Negara Islam Indonesia (NII). Kahar Muzakkar melakukan hubungan dengan Kartosuwirjo. Akhirnya keduanya sepakat untuk menggabungkan kekuatan. Pada tanggal 7 Agustus 1953, Abdul Kahar Muzakkar menyatakan diri keluar dari APRI dan menggabungkan pasukannya dengan DI/TII Kartosuwirjo. Tujuan gerakan mereka adalah melawan Pemerintah Pusat dan mendirikan Negara Islam Indonesia.⁴⁹

Selama kurang lebih 15 tahun Kahar Muzakar bersama pasukannya yang direkrut dari pemuda-pemuda desa di Sulawesi Selatan bergerilya di pedalaman Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Tengah. Gerakannya berhasil ditumpas oleh TNI melalui Operasi Tumpas - Kilat dengan dukungan Komando Tempur daerah Indonesia Timur (KOANDAIT) Kodam VIX/Hasanudin, Kodam V/Brawijaya, Kodam VI/Siliwangi, dan

⁴⁸Ibid., 102.

⁴⁹Ibid., 8.

Kodam VII/Diponegoro. Operasi Tumpas-Kilat dikordinasikan oleh Panglima Kodam XIV/Hasanudin, Kolonel Andi Muhammad Yusuf dan Operasi dilapangan dipimpin oleh Komandan RTP letkol Andi Sose, mantan anak buah Kahar Muzakkar.⁵⁰ Pada tanggal 2 Pebruari 1965 Komando Operasi Tumpas Kilat mengepung persembunyian Kahar Muzakkar dan pasukannya di sebuah hutan pegunungan, perbatasan Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara. Akhirnya pada tanggal 3 Pebruari pukul 03.00 subuh, Kahar Muzakkar tewas tertembak.⁵¹

Masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh GKST berkaitan dengan DI/TII adalah paksaan untuk masuk Islam dan mendukung serta berpartisipasi aktif dalam perjuangan mereka. Bila menolak, maka desa mereka akan dibakar dan diusir dari sana. Siapa yang melawan akan dibunuh. Pada masa itulah terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin jemaat; terutama yang berbangsa Barat, baik dari kalangan Gereja Katolik Sulawesi Selatan, Gereja Toraja, dan Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Misalnya pada tahun 1954, Kahar Muzakkar menculik Dr. V. D. Wetering, Dr. Wahl, dan Sibenus Treep. Ketiga orang yang disebutkan ini akhirnya meninggal dalam sekapan pasukan Kahar Muzakkar.⁵²

Tekanan dan ancaman yang seperti itu membuat sebagian orang Kristen beralih ke agama Islam dan bergabung dengan DI/TII. Di perbatasan Sulawesi Tengah dan Selatan Kahar Muzakkar menangkap Pendeta H. Versteenden dan jemaatnya serta mengancam mereka dengan hukuman mati. Tetapi hukuman itu dibatalkan karena Pdt. Versteenden dan jemaatnya bersedia masuk Islam dan ikut dalam gerakan

⁵⁰Ibid., 170.

⁵¹Ibid., 174.

⁵²Ibid., 52.

DI/TII. Pdt. Versteenden kemudian mengganti namanya menjadi Abdul Hakim.⁵³ Selama kurun waktu 1955 - 1965, tidak kurang dari delapan desa di wilayah Rampi, lima desa di wilayah Rato, dan lima belas desa di wilayah Malili Nuha, yang penduduknya adalah warga GKST, melarikan diri dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah karena dikejar oleh pasukan Kahar Muzakkar. Salah satu peristiwa tragis pada masa itu adalah penculikan dan pembunuhan seorang Guru Jemaat GKST di desa Leboni wilayah Rampi Sulawesi Selatan.⁵⁴ Akibat pemberontakan Kahar Muzakkar, jemaat-jemaat GKST yang ada di Sulawesi Selatan bubar dan pindah ke Sulawesi Tengah. Setelah keadaan aman dengan ditumpasnya DI/TII pada tahun 1965, beberapa jemaat kembali ke tanah dan desa-desa mereka di Sulawesi Selatan. Tetapi mereka menghadapi masalah karena tanah dan kebun mereka telah dikuasai oleh orang lain.

b. PERMESTA

Gerakan Politik yang kedua adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Perjuangan Semesta (PRRI-Permesta). Gerakan politik ini dideklarasikan di Makasar – ibu kota Propinsi Sulawesi pada waktu itu – pada tanggal 2 Maret 1957. Gerakan politik ini adalah sebuah afiliasi politik antara gerakan PRRI yang dipimpin oleh letkol Achmad Husein di Padang- Sumatera Barat dengan gerakan Perjuangan Semesta yang dipimpin oleh Letkol Infantri Ventje Sumual di Sulawesi Selatan.⁵⁵ Latar belakang kedua gerakan ini bersifat politik

⁵³ Ibid., 53

⁵⁴ Melaha, dalam: Majelis Sinode GKST, *Wajah GKST...*, 47.

⁵⁵ Syamdani, *PRRI: Pemberontakan atau Bukan?* (Yogyakarta: Medpress, 2009), 107. Letkol Ventje Sumual adalah Panglima Komando VII/Wirabuana di Makasar.

ekonomi dan bertujuan untuk pemerataan dan peningkatan ekonomi di daerah.⁵⁶

Pada Juni 1957, basis perjuangan PRRI-Permesta di Sulawesi dipindahkan dari Makasar ke Manado. Gerakan ini kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah NKRI pada tanggal 11 Januari 1958. PRRI-Permesta di Sulawesi adalah sebuah gerakan politik yang terorganisir dengan baik dan memiliki dukungan sosial, finansial serta persenjataan yang cukup. Wilayah kekuasaan mereka mencakup Manado, Minahasa, Bolaang Mongondow, Gorontalo, Sangir, Talaud, Buol, Toli-Toli, Moutong, Tinombo, Parigi, Palu, Donggala, Poso, Mori, Luwuk, dan Tana Toraja. Kekuatan militer PRRI Permesta di Sulawesi Tengah berasal dari Batalyon 719 Kodam Suluteng dan Brimob 5490 yang menyatakan diri berpisah dengan Markas Besar TNI di Jakarta dan bergabung dengan PRRI Permesta.⁵⁷

Sebagai reaksi terhadap pemberontakan dan perlawanan PRRI Permesta, maka pada bulan Juni 1958 Pemerintah Pusat NKRI di Jakarta menggelar Operasi Merdeka dan Operasi Sapta Marga IV dengan dukungan pasukan KKO-AL (Marinir), TNI Yonif 501/Brawijaya, TNI Yonif 601/Tanjung Pura, TNI Yonif 432/Diponegoro, dan Kompi Khusus KOANDAIT yang diterjunkan langsung di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.⁵⁸

Masalah dan kesukaran yang dihadapi oleh jemaat-jemaat GKST pada masa operasi penumpasan PRRI Permesta ini adalah bagaimana GKST dan warganya harus mengambil sikap politik dan sikap teologis terhadap perjuangan PRRI Permesta di satu pihak dan terhadap Pemerintah Pusat NKRI yang hadir di tengah mereka melalui pasukan TNI. Pasukan

⁵⁶ Sadi dkk., *Gerakan Pemuda Sulawesi...*, 78 - 82.

⁵⁷ Hasan & Darwis., *Sejarah Poso...*, 262.

⁵⁸ Sadi dkk., *Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah...*, 77.

gerilya Permesta meminta secara paksa dukungan politik, moril, serta materil dari gereja dan masyarakat yang adalah anggota GKST. Bahkan ketika mereka dikejar oleh Pasukan TNI, mereka bersembunyi di antara warga GKST. Apabila ada warga GKST yang menunjukkan sikap atau dicurigai tidak mendukung Permesta maka ia akan ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Sementara di pihak lain, TNI juga meminta agar gereja dan masyarakat, dalam hal ini jemaat-jemaat GKST tetap loyal terhadap pemerintah pusat NKRI dan mendukung operasi penumpasan Permesta yang digelar di Sulawesi Tengah. Bagi mereka yang didapati atau dicurigai mendukung Permesta akan ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Akibat tekanan dari kedua pihak ini, maka tidak sedikit pemimpin GKST dan pendeta jemaat yang mengalami intimidasi, penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan, baik oleh pihak PRRI Permesta maupun oleh pihak TNI. Pada tanggal 5 Desember 1957 sejumlah warga GKST lari ke hutan dan bersembunyi karena akan dibunuh oleh pasukan Permesta. Pada tanggal 25 Desember 1957 terjadi kekacauan antara pasukan Permesta dengan warga GKST yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Permesta kemudian menutup semua akses informasi dan komunikasi GKST dengan dunia luar. Tidak cukup hanya sampai disitu, Permesta mengambil alih Kantor Sinode GKST di Tentena dan membakar semua arsip serta dokumen GKST, kemudian menjadikannya markas mereka. Rumah-rumah jabatan para Pendeta GKST di Tentena diperintahkan untuk dikosongkan karena akan dijadikan asrama pasukan Permesta.⁵⁹ Tentang kehidupan anggota jemaat, J. Melaha menulis:

⁵⁹ Melaha, dalam: Majelis Sinode GKST, *Wajah GKST...*, 58.

Keadaan semakin memprihatinkan. Rakyat dianjurkan membuat lubang perlindungan dekat rumah mereka. Putri sulung Ketua Sinode mendapat nama julukan '*angga mbayau*' (setan gua), sebab siang lahir, malamnya sudah berada dalam gua perlindungan sampai pagi, dst menginap di gua hingga usia 2 bulan. Rakyat petani tidak dapat mengerjakan usahanya dengan aman.⁶⁰

Keadaan mulai membaik menjelang akhir tahun 1960, ketika para pemuda di Sulawesi Tengah dapat melakukan konsolidasi dan mobilisasi menghadapi Permesta di Poso. Tanggal 30 April 1959 KASAD Letjen A.H. Nasution memberi bantuan persenjataan terhadap konsolidasi pemuda Sulawesi Tengah (nantinya disebut Gerakan pemuda Sulawesi Tengah/GPST) untuk mendesak Permesta keluar dari Sulawesi Tengah. Akhirnya pasukan Permesta yang ada di wilayah Pamona dan Lore di bawah pimpinan Mayor Gerungan melarikan diri ke Sulawesi Selatan dan bergabung dengan pasukan DI/TII Kahar Muzakkar. Sementara pasukan Permesta yang ada di Poso dan Parigi menyingkir ke Gorontalo dan kembali ke Minahasa.⁶¹ Sejak saat itu GKST kembali dapat berhubungan dengan dunia luar. GKST membuka hubungan dengan STT Jakarta, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan RS Cikini Jakarta dalam rangka penyediaan tenaga-tenaga pendeta, guru, dan petugas kesehatan di wilayah pelayanan GKST.⁶²

⁶⁰Ibid., 59.

⁶¹Sadi dkk, *Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah ...*, 166.

⁶²Ibid., 60.

c. Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST)

Gerakan ketiga adalah Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST). Organisasi ini berdiri sebagai reaksi para pemuda Sulawesi Tengah terhadap sebuah sayap revolusior militan Permesta yang bernama Komando Pemuda Permesta (KoP2) dan gerakan penetrasi DI/TII di perbatasan dengan Sulawesi Selatan. GPST dideklarasikan di kota Poso pada tanggal 3 Desember 1957 oleh seorang warga GKST bernama Asa Bungkundapu. Tujuan GPST adalah untuk mengkonsolidasikan para pemuda Sulawesi Tengah melawan Permesta dan DI/TII serta memperjuangkan pemisahan provinsi Sulawesi Tengah dari Sulawesi Utara.⁶³

GPST adalah organisasi pemuda Sulawesi Tengah yang pro NKRI dan bersifat lintas agama. Kegiatan mereka bersifat politik dan militer. Di bidang politik GPST mematahkan propaganda politik anti NKRI dan menentang konsep Negara Islam Indonesia (NII). Di bidang militer GPST melakukan perlawanan bersenjata secara gerilya terhadap pasukan TNI Batalyon 719 Kodam Suluteng yang telah bergabung dengan Permesta dan menghalau gerakan pasukan DI/TII di Selatan yang mereka sebut *gorilla* atau gerombolan pemberontak.⁶⁴ Wilayah operasi GPST mencakup daerah Palu, Donggala, Parigi, Poso, Tentena, Lore, Ampana, Luwuk, Mori, Bungku di Sulawesi Tengah dan Malili, Nuha, Wotu, Rato, dan Rampi di Sulawesi Selatan.⁶⁵ Sebelum Jakarta melakukan Operasi Merdeka dan Sapta Marga II untuk menumpas PRRI Permesta di Sulawesi Utara dan Tengah, GPST berhadapan dengan Permesta. Namun demikian karena kurangnya dukungan finansial dan persenjataan maka GPST lebih sering terdesak. Kemenangan GPST adalah mereka mendapat dukungan moril

⁶³ Hasan & Darwis, *Sejarah Poso...*, 263.

⁶⁴ Sadi dkk, *Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah ...*, 100.

⁶⁵ *Ibid.*, 122.

dari seluruh komponen masyarakat Sulawesi Tengah dan mereka menguasai medan pertempuran di hutan-hutan dan pedalaman Sulawesi Tengah.

Masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh GKST dalam konteks pertentangan antara Permesta dengan GPST adalah ketika Permesta masuk ke Sulawesi Tengah lalu berhadapan dengan GPST, warga jemaat dan para pemimpin GKST terjepit dalam menentukan sikap untuk mendukung siapa. Mereka mengalami tekanan, paksaan dan intimidasi untuk berpihak pada Permesta di satu pihak atau GPST di pihak lain. Permesta, yang kebanyakan adalah orang-orang Kristen dari Minahasa meminta secara paksa dukungan politik dan finansial dari masyarakat Sulawesi Tengah yang sebagian besar adalah warga GKST. Sementara GPST mengambil sikap oposisi terhadap tujuan-tujuan politis dan operasi militer Permesta. Akibatnya secara kelembagaan dan secara kemasyarakatan GKST terjepit dan berada dalam tekanan dari dua gerakan politik tersebut. Itulah sebabnya jemaat dan gereja nyaris terbelah. Masyarakat yang beragama Islam sebagian besar anti Permesta dan mendukung GPST. Masyarakat GKST yang mempunyai hubungan kultural dengan orang-orang Minahasa mendukung Permesta. Sementara masyarakat GKST yang berasal dari suku-suku lokal Poso sering dengan terpaksa tunduk pada Permesta karena ancaman senjata. Tetapi bila hal itu diketahui oleh GPST maka akibatnya fatal bagi mereka.⁶⁶

Keadaan ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan GKST. Secara organisasi, GKST sering diintervensi oleh Permesta dan GPST. Secara pelayanan terjadi kemunduran karena beberapa pendeta ditangkap, baik oleh Permesta maupun oleh GPST. Secara persekutuan, jemaat sering harus lari dan bersembunyi di ladang-ladang dan hutan-

⁶⁶ibid., 123.

hutan sehingga ibadah terabaikan. Namun, sebagai sebuah organisasi keagamaan, GKST tetap mempertahankan posisinya yang netral dan menghindari keterlibatan politik secara praktis melalui gerakan-gerakan tersebut. Apa yang dipentingkan oleh GKST pada waktu itu adalah tetap mengusahakan jalannya pendidikan di seluruh wilayahnya dengan membuka sekolah-sekolah dasar di setiap desa di mana ada jemaatnya, membuka beberapa sekolah lanjutan, dan menyiapkan tenaga-tenaga pengajar serta memelihara iman jemaat.

Tentang masa ini, Pdt. J. Melaha, Ketua Majelis Sinode GKST periode 1957-1970 mengatakan:

Karena berkat sejarah pengalaman selama periode 1947 - 1970, GKST makin mengenal dirinya sebagai gereja Tuhan. GKST bukan berada di luar kenyataan yang mempengaruhi dirinya, tetapi gereja adalah bagian integral dari masyarakat di mana ia berada. Justru di situlah gereja, GKST khususnya, berdiri untuk menyatakan: bagi siapa dan untuk apa ia hadir.⁶⁷

7. Kerusuhan dan Konflik Poso 1998-2005

Tujuh tahun sesudah perayaan 100 tahun Injil masuk tana Poso,⁶⁸ kembali GKST berhadapan dengan ujian dan cobaan yang berat akibat kerusuhan sosial dan konflik horisontal yang berbau sara di Poso. Konflik antar peradaban dan politik identitas di tengah gelombang globalisasi dan neo-

⁶⁷ Melaha, dalam: Majelis Sinode GKST, *Wajah GKST...*, 66.

⁶⁸ Injil tiba di Poso melalui kedatangan Albert Christian Kruyt pada tahun 1892. Karena itu pada tahun 1992, GKST memperingati genap 100 tahun Injil masuk Tana Poso. Sesudah 17 tahun bekerja di antara orang Poso, maka pada tanggal 26 Desember 1909, bertempat di sungai Puna Kasiguncu, Papa I Wunte, seorang tua suku Pamona Pebato memberi diri dibaptis bersama dengan keluarga dan klannya. Lih. Kruyt, *Kabar Keselamatan di Poso...*, 58-161.

kapitalisme liberal yang melanda dunia, krisis ideologis dan instabilitas politik Indonesia pasca Orde Baru, fenomena kebangkitan agama yang sangat dogmatis dan ritualistik di wilayah publik, gerakan fundamentalisme serta radikalisme agama sebagai reaksi negatif terhadap proses modernisasi dan sekularisasi, krisis ekonomi dan munculnya ragam masalah sosial seperti kemiskinan struktural dan pengangguran ternyata telah mengakibatkan anomali dalam struktur sosial masyarakat di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Hubungan-hubungan sosial antar manusia dan antar golongan yang dulunya ramah dan jinak, berubah menjadi, bringas, ganas dan liar. Tingkat kepercayaan orang terhadap pemimpin di lembaga-lembaga sosial politik dan sosial keagamaan yang konvensional menurun secara drastis, termasuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat hukum. Nilai-nilai hidup komunal yang menekankan toleransi dan kerjasama tertelan oleh sentiment-sentimen primordialisme. Kecenderungan ini telah memberi andil bagi hancurnya struktur sosial masyarakat Poso, ketika aksi-aksi kekerasan masa, intimidasi, dan teror berdarah yang berlatar belakang sentiment suku dan agama terjadi di dalam masyarakat Poso. Modal sosial dan kearifan lokal yang disemboyankan dengan ungkapan *Sintuwu Maroso* yang artinya hidup untuk saling menghidupkan dalam satu kebersamaan tercabik dan robek.⁶⁹ Masyarakat Poso yang dibesarkan dalam kultur persahabatan, perdamaian dan cinta kasih berubah seketika menjadi menjadi masyarakat yang sarat dengan benih kebencian, permusuhan, dan balas dendam.

⁶⁹ Ade Alawi dkk., *Kabar Dari Poso: Menggagas Jusnalisme Damai* (Jakarta: LSPP, Kedubes Inggris, 2001), 53-58.

Menurut laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso tanggal 5 Desember 2004 bahwa sejak kerusuhan pecah pada tanggal 27 Desember 1998, tercatat korban meninggal 1.577, luka berat 745, dan luka ringan 439 orang. Rumah penduduk yang terbakar sebanyak 12.932 unit, rusak berat 10.378, rusak ringan 1.690, sementara sarana rumah ibadah yang terbakar sebanyak 153 unit. Fasilitas umum yang terbakar dan rusak tercatat 510 unit, sementara taksiran kerugian materil mencapai hampir 450 milyar. Menurut data Crisis Center GKST bahwa dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 terdapat sebanyak 25.153 pengungsi warga GKST yang tersebar di berbagai wilayah propinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.⁷⁰

Dari tengah situasi sosial dan kondisi kehidupan seperti ini, Majelis Sinode GKST, dalam Laporan Pelayanannya di depan Sidang Sinode GKST ke-41 tanggal 12-18 Oktober 2004 di Tentena menyebutkan:

Konflik dan kerusuhan yang melanda hampir seluruh wilayah pelayanan GKST telah membuat seluruh tatanan dan semua system kehidupan bermasyarakat dan bergereja porak poranda. Penderitaan, ketertindasan, dan keterpurukan yang dialami oleh warga GKST secara psikologis menyebabkan daya tahan warga jemaat menjadi lemah, frustrasi, dan putus asa. Tetapi di lain pihak penderitaan ini menguji ketabahan dan kesabaran gereja untuk tetap bertahan menghadapi badai dan berusaha tidak lelah melayani bagi persekutuan jemaat.⁷¹

⁷⁰ Rinaldy Damanik, *Tragedi Kemanusiaan di Poso* (Yogyakarta: Yayasan CD Bethesda, 2003), 267.

⁷¹ Majelis Sinode GKST, *Laporan Pelayanan Majelis Sinode GKST Periode 2001 - 2004*,

Pada masa itu GKST bersama-sama dengan seluruh masyarakat Poso mengalami cobaan dan ujian yang berat. Selama berlangsung aksi-aksi kekerasan, berupa penyerangan desa, penjarahan dan pembakaran, penganiayaan, penculikan, dan pembunuhan, tidak kurang dari 72 jemaat lokal GKST, terutama yang ada di kecamatan Poso Kota, Poso Pesisir, dan Poso Lage, melarikan diri dari tempatnya dan mengungsi ke Tentena, Morowali, Palu, Minahasa, dan beberapa tempat lain yang dianggap aman.⁷² Dari semua jemaat lokal yang mengungsi ini, sebagian telah kembali dan membangun lagi rumah-rumah dan gedung gereja mereka. Tetapi jemaat-jemaat yang berasal dari Klasis Poso Kota, Lage Tojo, Kolonodale Bungku yang mengungsi ke Tentena tidak kembali lagi ke tempat asalnya karena alasan trauma dan kehilangan pekerjaan.

Salah satu masalah yang muncul dalam proses penegakkan hukum dan pemulihan keamanan di Poso adalah ketidaktegasan aparat keamanan dan penegak hukum dalam menyikapi berbagai aksi kekerasan massa, teror berdarah, dan pelanggaran hukum. Tidak dapat disangkal bahwa secara personal ada beberapa oknum aparat yang memanfaatkan situasi konflik untuk kepentingan ekonomi dengan cara menjual jasa bagi warga yang memerlukan pengawalan dalam perjalanan. Ada juga oknum, yang karena kesamaan suku dan agama, maka dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi kekerasan, teror berdarah, dan pelanggaran hukum. Bahkan pemerintah di tingkat lokal dan nasional tidak dapat bertindak tegas terhadap kelompok teroris yang memakai kedok agama di Poso.⁷³ Pada bulan Desember 2006 dan Januari 2007, berdasarkan laporan intelijen bahwa di Tanah

⁷² Damanik. *Tragedi Kemanusiaan di Poso.*, 269.

⁷³ *Ibid.*, 126.

Runtuh kelurahan Gebang Rejo terdapat markas dan persembunyian sejumlah orang bersenjata yang diduga keras bertanggung jawab terhadap sejumlah aksi penculikan, pembunuhan, dan pengeboman di Poso, maka Satuan Tugas (Satgas) Brimob Kelapa Dua Jakarta melakukan penyergapan di lokasi tersebut. Penyergapan itu mendapat perlawanan bersenjata dari para tersangka. Namun ketika Satgas Brimob terus berupaya untuk mengatasi perlawanan dan tindakan melawan hukum tersebut, maka atas desakan beberapa ormas keagamaan, Pemerintah Pusat di Jakarta memerintahkan agar pasukan Brimob ditarik mundur dari TKP. Ketidaktegasan Pemerintah dan Negara dalam penegakkan hukum seperti ini sering terjadi dan mengakibatkan aksi-aksi kekerasan massa terus terjadi di dalam masyarakat.⁷⁴

Dalam Sidang Sinode Antara GKST ke-42/GKST/2006, Krisis Center dan Biro Hukum GKST menyampaikan bahwa masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh GKST secara kelembagaan dan perorangan pada masa masa konflik antara lain adalah:

- Bagaimana melindungi dan menyelamatkan warga GKST yang berada di daerah yang dilanda kerusuhan dan mengalami penyerangan serta teror berdarah.
- Bagaimana mengevakuasi dan menyediakan tempat pengungsian yang layak serta memenuhi kebutuhan hidup mereka selama berada dalam pengungsian.
- Bagaimana menghindarkan warga GKST dari keterlibatan dalam aksi-aksi kekerasan dan pembalasan.
- Bagaimana mengusahakan pendampingan dan pembelaan hukum terhadap warganya yang ditangkap dan diadili karena tuduhan melakukan aksi kekerasan dan pembunuhan.

⁷⁴ Alawi dkk, *Kabar Dari Poso...*, 41.

- Bagaimana melakukan konsolidasi untuk menghadapi upaya provokasi yang menginginkan kelangsungan kerusuhan dan konflik Poso.
- Bagaimana mendampingi warganya yang masih mengalami trauma.
- Bagaimana melibatkan diri secara kritis, positif, konstruktif dan progresif terhadap upaya-upaya rekonsiliasi.⁷⁵

Selama kurang lebih delapan tahun GKST bergumul dengan masalah-masalah tersebut di atas. GKST juga berupaya melakukan analisis terhadap akar penyebab kerusuhan dan konflik tersebut serta faktor-faktor pemberat. Selain oleh faktor-faktor sosial politik yang ada, beberapa tokoh GKST sendiri mengatakan bahwa kerusuhan dan konflik Poso antara lain telah diandili oleh praktek bergereja yang kurang menekankan dimensi sosial dan kultur lokal serta bersifat eksklusif, triumfalistik, dan apologetis.⁷⁶ Hal itu nampak dari ajaran-ajaran dan praktek kehidupan gereja yang sangat tradisional, abstrak, dan tidak memperhitungkan dinamika perubahan sosial masyarakatnya. Secara formal dan ritual, gereja begitu aktif dengan berbagai persekutuan ibadah dan perayaan-perayaan keagamaan. Tetapi pada saat yang sama gereja tidak membekali warganya untuk menghadapi berbagai persoalan sosial ekonomi yang disebabkan oleh perubahan struktur sosial, kemajuan infra struktur transportasi dan pergeseran demografi di Sulawesi Tengah.

Ada juga yang mengatakan bahwa kerusuhan dan konflik itu menunjukkan minimnya kepekaan GKST terhadap keterpurukan komunitas-komunitas pribumi (*indigenous people*) – khususnya suku Pamona, suku Lore, dan suku Mori –

⁷⁵ Biro Hukum & Krisis Senter GKST, *Laporan Pelayanan Biro Hukum dan Krisis Senter Periode 2004-2006*.

⁷⁶ Damanik, *Tragedi Kemanusiaan di Poso..*, 47.

yang kebanyakan adalah anggota GKST dalam menghadapi gelombang migrasi penduduk dari Sulawesi Selatan dan Jawa, seiring terbukanya jalur trans-Sulawesi. Sesudah masa pergolakan, gereja kurang memberi perhatian pada pemberdayaan komunitas-komunitas pribumi di Poso yang nota bene adalah anggota-anggotanya sendiri, sehingga terjadi proses pemiskinan dan marginalisasi secara beruntun.⁷⁷ Kondisi ini kemudian dipakai oleh para politikus untuk perebutan kekuasaan di tingkat lokal menjelang suksesi Bupati Poso tahun 1999.⁷⁸

Memang kalau dicermati, setelah melewati masa pergolakan GKST lebih menekankan pengembangan jemaat pada dimensi ritual dan formal. Hal itu bisa dilihat melalui pembangunan rumah-rumah ibadah berbiaya tinggi dan perayaan-perayaan keagamaan yang meriah. Pada periode tahun 1990-1998, seorang pengusaha nasional dari kelompok Eka Tjipta Wijaya mendapat Hak Pengolahan Hutan (HPH) di Kabupaten Poso. Untuk merebut hati masyarakat yang kebanyakan adalah anggota GKST, pengusaha tersebut menyediakan bantuan dana untuk proyek-proyek pembangunan gedung gereja, khususnya di wilayah Poso Pesisir, Poso Kota, dan Poso Lage, tempat perusahaannya beroperasi. Pada saat yang sama, kehidupan sosial dan ekonomi jemaat kurang mendapat perhatian. Malahan ruang gerak mereka sebagai petani ladang semakin terbatas karena kehadiran perusahaan pengolah hutan dan bencana banjir di musim penghujan yang melanda sawah dan pemukiman penduduk akibat penebangan hutan.⁷⁹ GKST sebagai lembaga tidak dapat berbuat banyak, selain karena telah mendapat

⁷⁷ Ibid., xxi

⁷⁸ Ibid., ix.

⁷⁹ Fakta ini terjadi di daerah Tambarana dan Membuke Kec. Poso Pesisir Kabupaten Poso. Wawancara dengan Pdt. Ishak Pole, M.Si. tanggal 26 November 2013 di Tentena.

bantuan dana untuk pembangunan gedung gereja, juga karena ia masih dipengaruhi oleh konsep pemahaman teologis eklesiologis GKST yang terlalu abstrak dan ideal serta kurang memperhitungkan dimensi empiriknya.

Stabilitas keamanan dan perdamaian di Poso diusahakan oleh pemerintah dan masyarakat sendiri. Pada tanggal 22 April 2000, pemerintah pusat mulai menggelar operasi Cinta Damai dan operasi Sintuwu Maroso dengan dukungan Pasukan TNI Kodam VII Wirabuana dan dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob Kelapa Dua Jakarta.⁸⁰ Dengan pendekatan operasi militer, maka masyarakat mendapat perlakuan yang kasar. Terlebih ketika militer melakukan pencarian dan pengejaran terhadap para tersangka yang diduga terlibat dalam kerusuhan Poso jilid ketiga, Mei 2000. Dalam kerusuhan itu, sebuah pondok Pesantren yang bernama Wali Songo di desa Sintuwu Lemba, Kec. Lage dijadikan tempat persembunyian oleh massa muslim yang menyerang dan membakar kota Poso pada kerusuhan jilid kedua, April 2000 dan mengakibatkan kurang lebih 10.000 keluarga Kristen kehilangan rumah dan harta benda serta lari mengungsi ke Tentena. Pada bulan Mei 2000, massa Kristen melakukan aksi pembalasan dengan melakukan konsolidasi dan penyerangan terhadap beberapa perkampungan muslim di Poso dan sekitarnya.⁸¹ Terjadi gelombang pengungsian massa muslim secara besar-besaran dari Poso ke Parigi melalui jalur laut. Sebagian bertahan di desa Sintuwu Lemba tempat Pondok Pesantren Wali Songo. Di tempat itulah, pada tanggal 27 -28 Mei 2000 terjadi kontak senjata yang hebat antara massa Kristen dengan massa muslim dan mengakibatkan jatuhnya

⁸⁰ Tony Tampake, *Deskripsi dan Analisis Gejala Mistisisme dalam Jemaat Pengungsi GKST di Tentena* (Tesis pada Program Pasca Sarjana Sosiologi Agama UKSW, 2006), 118.

⁸¹*Ibid.*, 119.

korban jiwa, terutama di pihak massa Islam. Tentang jumlah korban jiwa, terdapat data yang berbeda-beda. Menurut data Krisis Senter GKST, selama konflik Poso jilid 2 (April) dan jilid 3 (Mei) 2002 telah jatuh 526 korban tewas. Menurut Data Alkhairat Palu, selama April Mei 2000 terdapat 1000 korban tewas. Sedangkan menurut data tim investigasi independen Abdul Wahid Ganas, selama April Mei terdapat 165 korban tewas.⁸² Menurut data wartawan Kompas, ada 246 orang tewas dalam konflik April - Juni 2000, belum termasuk 111 mayat tidak dikenal yang dihanyutkan di sungai Poso.⁸³ Kesimpang siuran data ini disebabkan oleh subjektivitas, rasa curiga, dan ketidakseriusan pemerintah dalam mengungkap fakta yang sebenarnya.

Beberapa ormas Islam menyebut peristiwa Mei 2001 itu sebagai pembantaian kaum muslim. Berdasarkan opini itu, pasukan gabungan TNI dan Brimob melakukan pengejaran dan penangkapan besar-besaran terhadap warga GKST.⁸⁴ Penangkapan juga dilakukan terhadap warga yang memiliki atau menyimpan senjata organik maupun rakitan, atau amunisi. Bahkan para warga desa yang akan berangkat ke ladang dengan membawa perlengkapan kerja berupa sabit dan parang ditangkap oleh tentara. Selama tahun 2000 - 2004 masyarakat Kristen dan pimpinan-pimpinan jemaat mendapat intimidasi dan teror dari aparat keamanan.

Pada tanggal 19 Agustus 2002, Sekretaris Umum Majelis Sinode GKST dan Ketua Krisis Senter GKST, Pdt. Rinaldy Damanik, M.Si ditangkap oleh aparat Brimob Polda Sulteng pada saat ia melakukan evakuasi pengungsi warga GKST di desa Peleru Kecamatan Mori Atas. Ia dituduh

⁸² Damanik, *Tragedi Kemanusiaan di Poso...*, 55.

⁸³ Maria Hartiningsih, dalam Alawi dkk, *Kabar Dari Poso...*, 16.

⁸⁴ Damanik, *Tragedi kemanusiaan di Poso...*, 56

melanggar UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api tanpa dokumen resmi.

Pada bulan November 2001, sebagai balasan terhadap serangan massa Kristen atas kota Poso dan sekitarnya, masa muslim melakukan serangan balik, yang dilaksanakan secara serentak di beberapa wilayah, seperti Poso Pesisir, Lage, Mori Atas, dan Pamona Selatan. Serangan itu dilakukan pada saat terjadi kekosongan aparat di Poso, karena pemerintah menyatakan bahwa Operasi Cinta damai telah berakhir, para tersangka kerusuhan jilid tiga (Mei 2000) semuanya telah ditangkap, termasuk Fabianus Tibo, Dominggus da Silfa, dan Marinus Riwu.⁸⁵ Puncak serangan itu terjadi pada bulan November 2001. Di Lage ada enam desa berpenduduk warga GKST diserang dan dibakar. Serangan itu mengakibatkan 25 orang tewas, 24 luka berat, dan 1.350 kepala keluarga melarikan diri ke hutan. Di Poso Pesisir ada sepuluh desa berpenduduk warga GKST diserang dan dibakar. Untunglah dalam serangan itu tidak ada korban jiwa karena mereka segera lari ke hutan. Sebagai reaksi terhadap situasi yang sangat genting itu, pada tanggal 24 - 28 November 2001 terjadi konsolidasi dan mobilisasi massa di Tentena untuk melakukan perlawanan bersenjata. Tetapi pimpinan GKST dan tokoh-tokoh masyarakat membujuk para pemuda agar menghindari pertumpahan darah yang lebih besar dan menyerahkan penyelesaiannya kepada pemerintah dan negara. Akhirnya pada tanggal 29 November 2001, Majelis Sinode GKST, Krisis Senter GKST, dan Organisasi Pemuda Kristen Sulawesi Tengah mengirimkan surat SOS lewat fax kepada lembaga-lembaga nasional maupun internasional, seperti Persekutuan gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jakarta,

⁸⁵ Belakangan diketahui bahwa Operasi Cinta Damai hanya bertujuan untuk menangkap Tibo cs. Itulah sebabnya setelah mereka tertangkap, operasi dinyatakan selesai. Wawancara dengan Pdt. Ishak Pole tanggal 28 November 2013 di Tentena.

Sinode Am Gereja-Gereja Sulawesi Utara Tengah di Manado, Aliansi gereja-Gereja Reformasi se-Dunia, Dewan Gereja-Gereja se-Dunia di Jenewa, Paus di Roma, Sekjen PBB di New York, Dewan gereja-Gereja Asia di Hongkong, Ketua DPR/MPR RI di Jakarta, Presiden RI di Jakarta, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di Jakarta, Panglima TNI di Jakarta, dan Kapolri di Jakarta. Akhirnya pada tanggal 5 Desember 2001, Menko Polkam Susilo Bambang Yudoyono datang ke Poso dan Tentena. Kedatangan itu menjadi momentum bagi perundingan dan perjanjian damai di Malino pada tanggal 19 – 20 Desember 2001.

Setelah perjanjian Malino, secara umum keadaan mulai membaik. Masyarakat mulai tenang dan dapat melakukan aktifitasnya. GKST memusatkan perhatian pada kurang lebih 25.000 pengungsi yang memenuhi kota Tentena. Sejak saat itu tidak ada lagi konflik terbuka. Akan tetapi, muncul sekelompok orang di kota Poso, yang secara terencana dan terorganisir melakukan aksi-aksi teror berdarah terhadap warga Kristen dan pimpinan-pimpinan GKST. Aksi mereka berlangsung dari tahun 2003 sampai dengan 2006. Pada bulan Januari 2007, Satuan Tugas Brimob Polda Sulteng dan Satuan Brimob Densus 88 Anti Teror Kelapa Dua Bogor menyerang markas kelompok Bazri di Tanah Runtuh kelurahan Gebang Rejo Poso kota.